

KATA PENGANTAR

Dengan rasa gembira dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Dana Pensiun 1999 ini dapat hadir ditengah masyarakat Dana Pensiun. Buku Laporan yang merupakan terbitan ke empat sejak tahun 1996 ini disusun berdasarkan laporan berkala yang di sampaikan Pengurus Dana Pensiun setiap tahunnya, yaitu Laporan Keuangan, Laporan Portofolio, Laporan Aktuaris, dan Laporan Teknis.

Dari sisi ketaatan Pengurus dalam penyampaian laporan berkala, dapat dikatakan telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun sampai dengan saat ini masih ada Pengurus yang belum menyampaikan laporan. Kesesuaian bentuk dan susunan laporan berkala juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kami harap Laporan Tahunan Dana Pensiun ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan Dana Pensiun di Indonesia. Kepada rekan-rekan dan pihak lain yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 01 Desember 2000

Direktur Dana Pensiun,

Indomen Saragih, MA

1

TINJAUAN UMUM

Sebagaimana tahun sebelumnya, tahun 1999 masih diwarnai dengan maraknya kehidupan politik di tanah air. Puncaknya adalah dibentuknya pemerintahan baru pada akhir 1999. Dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian, di tahun tersebut pemerintah menerapkan berbagai kebijakan khususnya di bidang moneter. Berbagai kebijakan tersebut tampaknya mendapat respon yang positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi seperti menguatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penurunan tingkat suku bunga perbankan, penekanan tingkat inflasi serta perbaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada awal Januari 1999 nilai tukar rupiah per US\$ 1.00 adalah Rp 8.025,00 menguat menjadi Rp 7.100,00 di akhir tahun 1999. Tingkat bunga deposito berjangka yang di awal tahun sebesar 41,24% menurun drastis menjadi 12,54% per akhir Desember 1999. Tingkat inflasi yang di tahun 1998 mencapai 77,63% berhasil ditekan sampai 2,01%, sedangkan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut adalah 0,31%, jauh lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -13,01%.

❖ Perkembangan Dana Pensiun

Sebagaimana diuraikan di atas, kebijakan di bidang moneter berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, akan tetapi di lain pihak, kebijakan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap Dana Pensiun. Sebagai pengelola dana yang dihimpun dari masyarakat, pengurus Dana Pensiun dihadapkan pada tantangan baru sehubungan dengan investasi yang dilakukan. Dengan menurunnya tingkat bunga deposito berjangka dan belum stabilnya pasar modal Indonesia, pengurus Dana Pensiun tidak mudah untuk menentukan portofolio investasi yang dapat memberikan hasil yang optimal bagi Dana Pensiun. Oleh karena itu, sebagai langkah yang konservatif, di tahun tersebut investasi Dana Pensiun masih tetap didominasi oleh deposito berjangka.

Hingga akhir tahun 1999 tercatat 350 Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan yang meliputi 325 Dana Pensiun Pemberi Kerja dan 25 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (tabel 1.1). Sedangkan sampai dengan Desember 2000 jumlah Dana Pensiun

bertambah menjadi 372 dan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang sedang dalam proses pengesahan adalah 12 Dana Pensiun.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Dana Pensiun

	1996	1997	1998	Des 1999	Desem ber 2000
YDP	61	33	17	9	1
DPPK	240	278	308	325	344
Program Pensiun Manfaat Pasti	209	242	269	281	296
	87%	87%	87%	86%	86%
PIIP	31	36	39	44	48
	13%	13%	13%	14%	14%
DPLK	22	23	25	25	28
DP bubar*)			1	1	4

Catatan: * pembubaran yang sudah dimuat dalam lembaran berita negara

Walaupun berbagai indikator ekonomi menunjukkan adanya perbaikan kondisi di tahun 1999, dampak dari krisis yang telah dimulai sejak tahun 1997 masih dirasakan oleh pemberi kerja selaku pendiri Dana Pensiun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa Pendiri yang mengajukan permohonan pembubaran khususnya pendiri yang bergerak di bidang perbankan. Bank-bank yang terlikuidasi atau diambil alih oleh pemerintah secara otomatis membubarkan Dana Pensiun mereka. Hingga akhir tahun 1999 Dana Pensiun yang bubar adalah 17 Dana Pensiun. Pada tahun 2000 angka tersebut mengalami penambahan sebanyak 10 Dana Pensiun Pemberi Kerja dan 2 Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

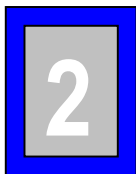
Industri Dana Pensiun memiliki prospek yang bagus untuk terus berkembang. Potensi tersebut terutama bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang per akhir 1999 baru memiliki jumlah peserta sebanyak 260.277 orang. Angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pekerja mandiri Indonesia per 1999 yang berjumlah 21,7 juta jiwa. Untuk itu diperlukan kesadaran para pelaku bisnis untuk mendirikan Dana Pensiun atau mengikuti program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selain itu perlu pula adanya peran aktif industri dalam mensosialisasikan Dana Pensiun kepada masyarakat.

❖ **Ketentuan Perundang-undangan Dana Pensiun**

Sejalan dengan dinamika di bidang investasi, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 78/KMK.017/1995

tanggal 3 Pebruari 1995 tentang Investasi Dana Pensiun dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 93/KMK.017/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 78/KMK.017/1995. Perubahan tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali dengan menerbitkan:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 499/KMK.017/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 78/KMK.017/1995 tentang Investasi Dana Pensiun
Dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa kesesuaian terhadap batasan investasi ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengharuskan dilakukannya kesesuaian terhadap batasan investasi setiap saat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 296/KMK.017/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Investasi Dana Pensiun
Keputusan tersebut antara lain mengubah ketentuan mengenai batasan maksimum investasi per pihak yang semula 10% per pihak menjadi 20 % per pihak, dengan pengecualian atas penempatan investasi pada penyertaan langsung dan Surat Pengakuan Hutang.



LAPORAN AKTUARIS

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) wajib menyampaikan laporan aktuaris kepada Menteri Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPPK yang bersangkutan, yang berkaitan dengan pendanaan program pensiun. Sampai dengan akhir bulan Desember 2000, jumlah Dana Pensiun yang pembentukannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan sebanyak 344 Dana Pensiun (DPPK dan DPLK). Dari jumlah tersebut DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebanyak 296 DPPK (86,1%).

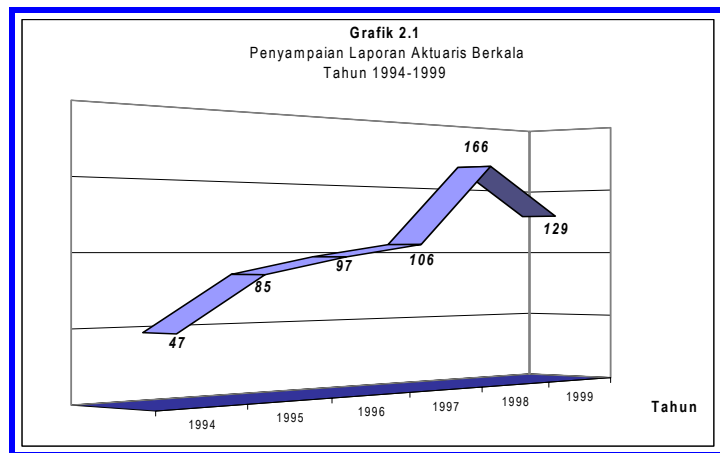
Pada akhir tahun 1998, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) telah menetapkan pedoman penyusunan laporan aktuaris yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, yaitu *Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun* [SPA-DP]. Namun demikian, SPA-DP tersebut baru disosialisasikan kepada para Aktuaris dalam kongres aktuaris tahun 2000. Dengan telah diterbitkan dan disosialisasikannya SPA-DP tersebut, diharapkan mulai valuasi aktuarial per 31 Desember 2000 atau setelahnya, disamping berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.017/1995 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, para Aktuaris dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam menyusun laporan aktuaris

❖ **Penyampaian Laporan Aktuaris (berkala)**

Dari 296 DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana tersebut di atas, sebanyak 129 DPPK (43,6%) telah menyampaikan Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1999 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Dana Pensiun. Hal ini karena sebanyak 167 DPPK (56,4%) belum mempunyai kewajiban untuk melakukan valuasi per 31 Desember 1999, sehingga terjadi penurunan jumlah DPPK yang menyampaikan Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1999 kepada Menteri Keuangan apabila dibandingkan dengan jumlah DPPK yang menyampaikan Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1998, yaitu sebanyak 37 DPPK (22,3%). Jumlah Laporan Aktuaris yang terlambat disampaikan kepada Menteri Keuangan menurun menjadi tinggal 4,6% apabila dibandingkan dengan penyampaian Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1998. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pengurus terhadap ketentuan yang

mengatur mengenai penyampaian laporan aktuaris semakin meningkat. Demikian pula dengan kesesuaian dan kelengkapan Laporan Aktuaris valuasi 31 Desember 1999 ini semakin meningkat. Namun demikian masih terdapat beberapa DPPK yang belum melengkapi laporan aktuaris dengan Pernyataan Pendiri yang berkaitan dengan kelengkapan data dan pemahaman atas kualitas pendanaan.

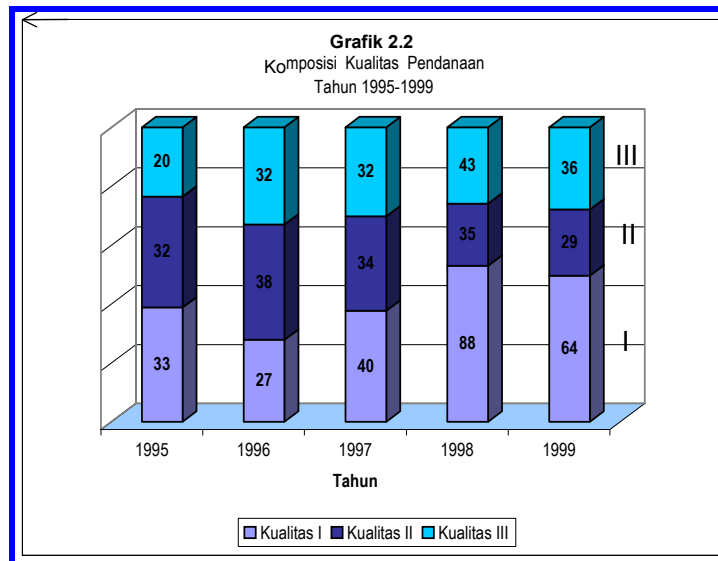
Grafik 2.1 menunjukkan laju peningkatan dan penurunan jumlah laporan aktuaris yang disampaikan kepada Menteri Keuangan selama periode valuasi tahun 1994 – 1999. Untuk valuasi tahun 1999, jumlah DPPK yang menyampaikan Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1999 sekitar 40%



dari total jumlah DPPK yang menyelenggarakan PPMP. Sedangkan untuk valuasi tahun 1998, jumlah DPPK yang menyampaikan laporan aktuaris sekitar 60% dari total jumlah DPPK yang menyelenggarakan PPMP. Penurunan penyampaian laporan aktuaris ini disebabkan karena kewajiban Pengurus DPPK menyampaikan laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. Peningkatan tajam hanya terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Pada periode tersebut banyak Pengurus yang melaksanakan valuasi dengan maksud mengetahui dampak krisis ekonomi pada besarnya kewajiban Dana Pensiun. Berdasarkan data pada Direktorat Dana Pensiun, dari 286 Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP sekitar 8% Dana Pensiun melaksanakan valuasi setiap tahun dan sekitar 53% Dana Pensiun melaksanakan valuasi setiap tiga tahun sekali.

❖ Kualitas Pendanaan

Grafik 2.2 menunjukkan bahwa dari 129 Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1999 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dapat diketahui bahwa sekitar 49,6% Dana Pensiun memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama dengan rasio pendanaan tertinggi 251% dan rasio



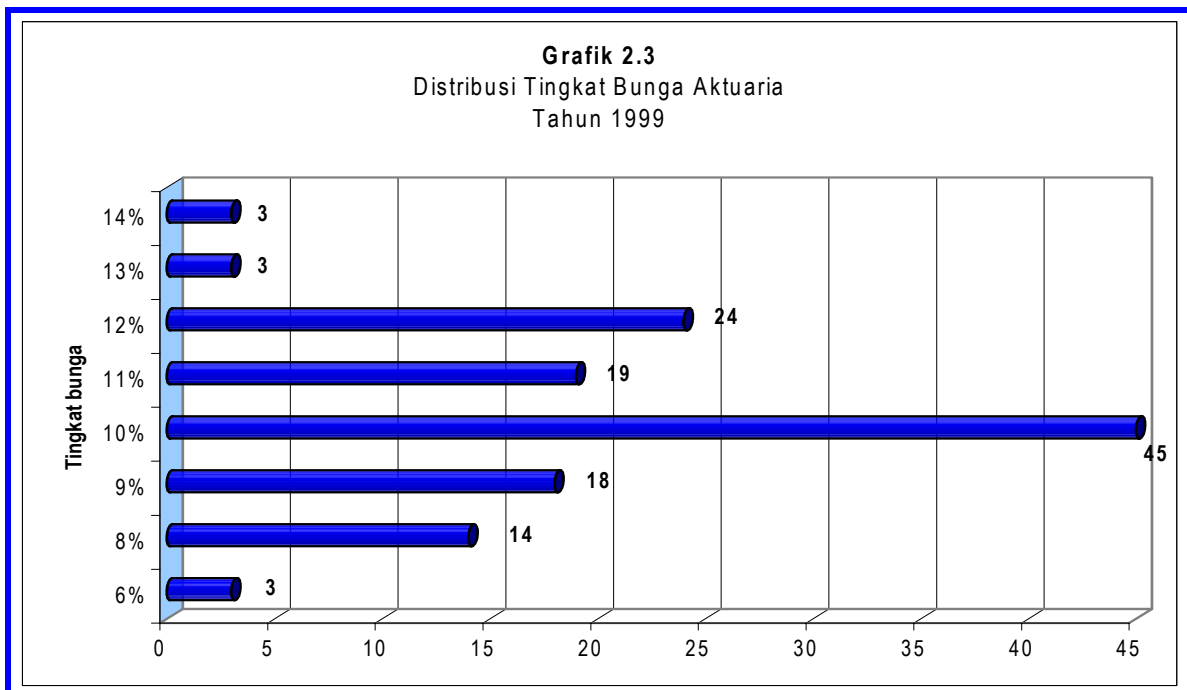
pendanaan terendah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Dana Pensiun yang memiliki kualitas pendanaan tingkat pertama sebesar 53%, hal ini menunjukkan penurunan persentase walaupun tidak begitu material. Dana Pensiun yang memiliki kualitas pendanaan tingkat kedua sekitar 22,5 % dengan rasio pendanaan tertingginya 99% dan rasio pendanaan terendahnya 56%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase Dana Pensiun yang memiliki kualitas pendanaan tingkat kedua hampir tidak mengalami perubahan. Disamping itu, Dana Pensiun yang memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga untuk valuasi per 31 Desember 1999 adalah 27,9% dengan rasio pendanaan tertinggi 95% dan rasio pendanaan terendahnya 3%. Berdasarkan data tersebut, perubahan persentase kualitas pendanaan yang terjadi pada valuasi per 31 Desember 1999 dapat dikatakan stabil (tidak begitu berarti) dibandingkan dengan valuasi tahun sebelumnya.

❖ Asumsi Aktuaria

Asumsi aktuaria yang digunakan aktuaris dalam melakukan valuasi per 31 Desember 1999 terdapat beberapa yang perlu mendapat perhatian, antara lain : tingkat bunga, tabel mortalita dan biaya operasional. Adapun analisis atas masing-masing asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

► **Asumsi Tingkat Bunga**

Tingkat bunga merupakan asumsi yang selalu digunakan dalam setiap melakukan valuasi pendanaan program pensiun, hal ini mengingat perannya yang sangat menentukan dalam menetapkan nilai kewajiban Dana Pensiun dan iuran normal Pemberi Kerja. Untuk valuasi per 31 Desember 1999, range tingkat bunga yang digunakan tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari tingkat bunga paling konservatif (= 6%) hingga tingkat bunga paling optimis (= 14%).



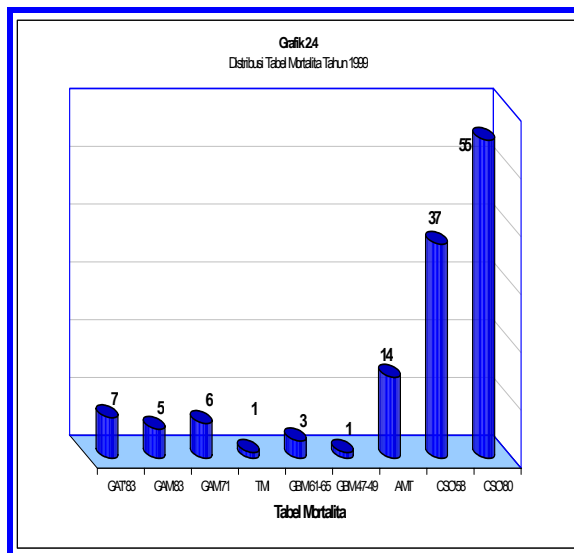
Grafik 2.3 menunjukkan bahwa tingkat bunga 10% adalah tingkat bunga yang paling banyak digunakan, sangat mencolok jika dibandingkan dengan tingkat bunga lainnya. Sekitar 45 Dana Pensiun atau sekitar 34% dari keseluruhan Dana Pensiun yang menyampaikan Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1999 menggunakan tingkat bunga aktuarial 10%. Penggunaan tingkat bunga 10% ini sesuai dengan rata-rata tingkat bunga deposito saat ini. Secara umum Dana Pensiun menganggap bahwa tingkat bunga ini yang paling aman untuk mengantisipasi kewajiban jangka panjangnya.

Di sisi lain, tingkat bunga 12% dimana merupakan tingkat bunga yang paling banyak digunakan dalam valuasi aktuarial yang dilakukan tahun sebelumnya, mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan valuasi aktuarial yang dilakukan dalam tahun 1999, baik dari sisi jumlah maupun dalam persentasenya. Pada tahun ini jumlah Laporan Aktuaris yang menggunakan tingkat bunga 12% sebanyak 24 Laporan atau menurun sebanyak 50% dari tahun sebelumnya, yaitu 43 Laporan. Tingkat bunga konservatif lainnya yaitu 8% dan 9% digunakan dalam masing-masing 14 dan 18 Laporan Aktuaris. Tingkat bunga yang lebih optimis dan cukup banyak digunakan dalam Laporan Aktuaris tahun ini yaitu tingkat bunga 11% sebanyak 19 laporan.

Pada valuasi aktuarial tahun 1999, terdapat 3 Laporan Aktuaris yang menggunakan tingkat bunga 14%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito, yaitu 10%, penggunaan tingkat bunga ini dapat dikatakan sangat optimis. Di lain pihak, terdapat 3 Laporan Aktuaris yang menggunakan tingkat bunga yang konservatif, yaitu tingkat bunga 6%. Penggunaan tingkat bunga ini untuk mengantisipasi risiko jangka panjang.

▶ Tabel mortalita

Sebagaimana telah diketahui, tabel mortalita merupakan tabel yang menggambarkan tingkat kematian seseorang. Untuk menampilkan gambaran tingkat kematian yang sebenarnya dari penduduk Indonesia, pada tahun 2000 pihak DAI dan PAI dengan dibantu pihak-pihak terkait lainnya telah menerbitkan suatu tabel mortalita yang disebut Tabel Mortalita Indonesia 2000. Tabel ini merupakan suatu lanjutan, atau penyempurnaan dari tabel mortalita sebelumnya yang diterbitkan tahun 1993. Dengan diterbitkannya tabel ini diharapkan aktuaris mempunyai acuan dalam mencari pendekatan nilai mortalitas penduduk di



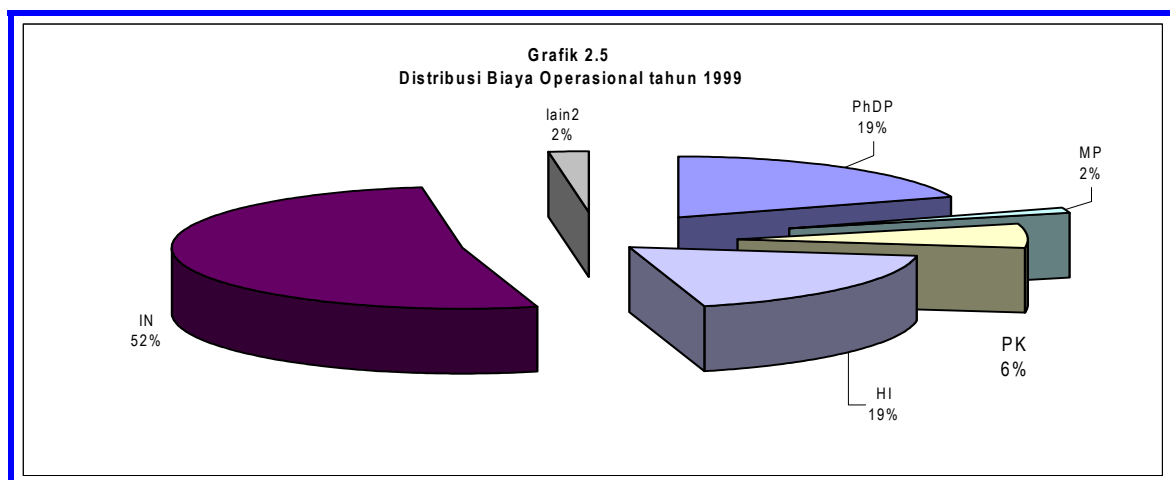
Indonesia. Diharapkan pula bahwa Tabel Mortalita Indonesia versi terbaru ini akan lebih dikenal di kalangan aktuaris dibandingkan dengan Tabel Moralita Indonesia versi sebelumnya. Hal ini dikarenakan, setiap tahunnya hanya 1 (satu) atau 2 (dua) Dana Pensiun yang menggunakan Tabel Mortalita Indonesia.

Grafik 2.4 menunjukkan bahwa pada valuasi aktuarial tahun 1999 ini hanya 1 (satu) Laporan Aktuaris yang menggunakan Tabel Mortalita Indonesia. Sedangkan di tahun sebelumnya, terdapat 4 (empat) Laporan Aktuaris yang menggunakan Tabel Mortalita Indonesia. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada valuasi aktuarial tahun 1999, tabel mortalita yang paling banyak digunakan oleh aktuaris adalah tabel Commissioner Standar Ordinary [CSO]'80. Penggunaan tabel ini dalam valuasi aktuarial menurun secara jumlah tetapi secara persentase meningkat sekitar 5%. Banyaknya aktuaris yang menggunakan tabel ini menunjukkan bahwa tabel ini masih dianggap mewakili tingkat mortalitas di Indonesia atau paling tidak dianggap sesuai dengan pengalaman mortalita dari Pemberi Kerja. Tabel mortalita lainnya yang cukup dikenal di kalangan aktuaris Indonesia adalah tabel Commissioner Standar Ordinary [CSO]'58. Tabel ini sejak tahun 1997 selalu digunakan oleh banyak aktuaris dalam melakukan valuasi aktuarial. Tahun ini, 29% Laporan Aktuaris menggunakan tabel Commissioner Standar Ordinary [CSO]'58. Sementara jenis tabel lainnya terdistribusi merata penggunaannya, seperti GAM'71, GAM'80 dan GAT'83.

► **Biaya Operasional**

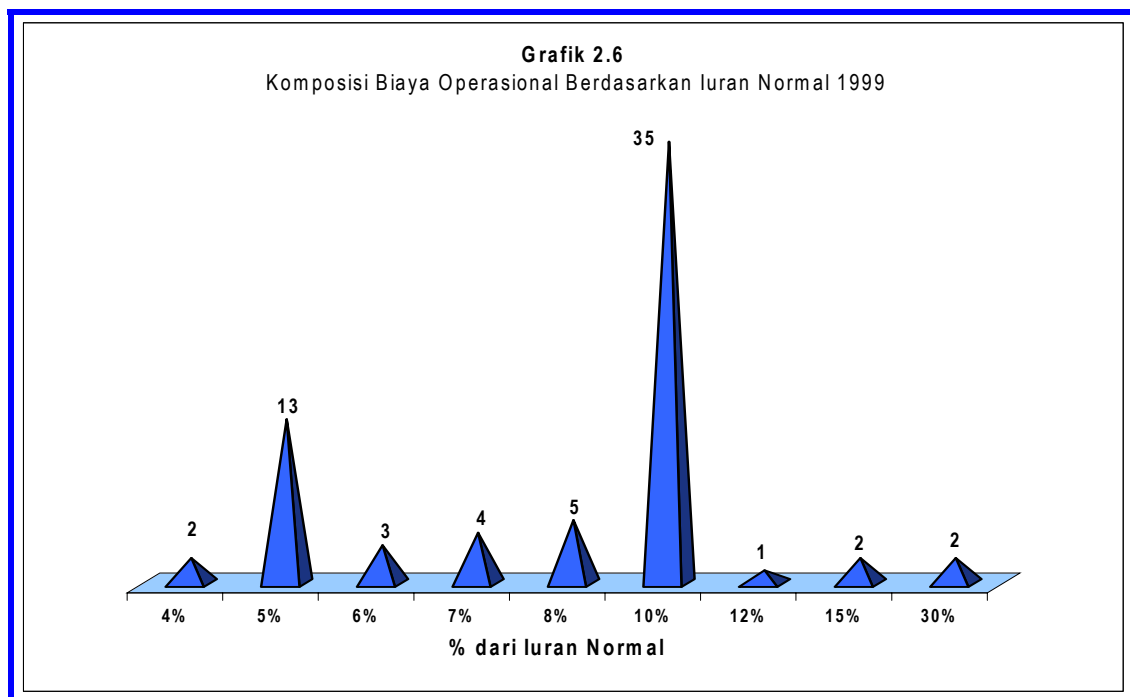
Setiap penyelenggaraan usaha selalu memerlukan biaya pengelolaan. Demikian juga dengan pengelolaan program pensiun yang dilaksanakan oleh Dana Pensiun, tentunya membutuhkan biaya. Biaya yang dibutuhkan selain untuk pembayaran manfaat pensiun, juga dibutuhkan untuk operasional pengelolaan Dana Pensiun. Penetapan besarnya biaya operasional untuk setiap Dana Pensiun berbeda-beda, tergantung kepada jumlah peserta aktif atau pensiunan dan besarnya investasi atau aktiva bersih. Sering kali penetapan biaya operasional ini dijadikan indikator bagi Dana Pensiun dalam menentukan tingkat efisiensi penyelenggaraan program pensiun.

Penentuan biaya operasional untuk tahun anggaran berikutnya biasanya ditetapkan berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya dan juga pada perencanaan anggaran belanja di tahun berikutnya. Setiap melaksanakan valuasi, aktuaris harus memperhitungkan perkiraan biaya tahunan yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun. Penetapan asumsi besarnya biaya operasional biasanya didasarkan kepada Penghasilan Dasar Pensiun, iuran normal, hasil investasi dan lain-lain.



Grafik 2.5 menunjukkan bahwa iuran normal masih tetap merupakan dasar utama dalam menetapkan asumsi biaya operasional. Pada valuasi aktuarial tahun 1999, terdapat 52% Laporan Aktuaris yang menetapkan asumsi biaya operasional berdasarkan iuran normal. Hal ini sama dengan valuasi aktuarial tahun sebelumnya, dimana 54% Laporan Aktuaris menetapkan asumsi biaya operasional berdasarkan iuran normal. Selain iuran normal, banyak Laporan Aktuaris yang menjadikan Penghasilan Dasar Pensiun dan hasil investasi sebagai dasar penetapan asumsi biaya operasional. 19 % Laporan Aktuaris valuasi tahun 1999 menjadikan Penghasilan Dasar Pensiun sebagai dasar penetapan biaya operasional dan 19% lainnya menjadikan hasil investasi sebagai dasar penetapan biaya operasional. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

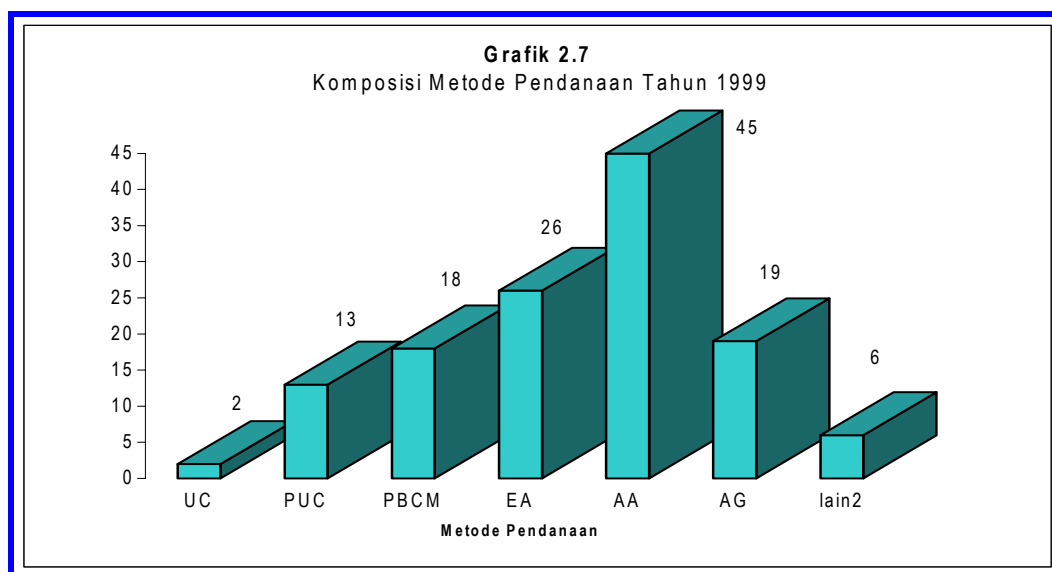
Pada valuasi aktuarial tahun sebelumnya, 23% Laporan Aktuaris menjadikan Penghasilan Dasar Pensiun sebagai dasar penetapan biaya operasional dan 12% lainnya menjadikan hasil investasi sebagai dasar penetapan biaya operasional. Selanjutnya, 10% Laporan Aktuaris menjadikan manfaat pensiun, cadangan, dan lain-lain sebagai dasar penetapan asumsi biaya operasional.



Pada valuasi aktuarial tahun 1999 penetapan asumsi biaya operasional yang didasarkan kepada iuran normal mempunyai range yang cukup tinggi, yaitu mulai dari 4% sampai dengan 30%. Hal yang sama terjadi pada valuasi aktuarial tahun sebelumnya, di mana range penetapan biaya operasional berkisar antara 4% sampai dengan 36%. Tingginya range ini tidak dapat dijadikan indikator sebagai ukuran untuk menentukan tingkat efisiensi penyelenggaraan program pensiun. Grafik 2.6 menunjukkan bahwa dari 77 Laporan Aktuaris yang mendasarkan asumsi biaya operasional kepada iuran normal, 35 Laporan Aktuaris (45%) menetapkan asumsi biaya operasional sebesar 10% dari iuran normal dan 13 Laporan Aktuaris (17%) menetapkan asumsi biaya operasional sebesar 5% dari iuran normal. Selanjutnya, tingkat asumsi biaya operasional lainnya, seperti 4%, 6%, 7%, 8%, 12%, 15%, atau 30% dari iuran normal, terdistribusi secara merata pada 19 Laporan Aktuaris.

► Metode Pendanaan

Sebagai salah satu faktor yang cukup berperan dalam menentukan besar kecilnya kewajiban Dana Pensiun dan penetapan iuran Pemberi Kerja, komposisi pemilihan metode pendanaan tidak



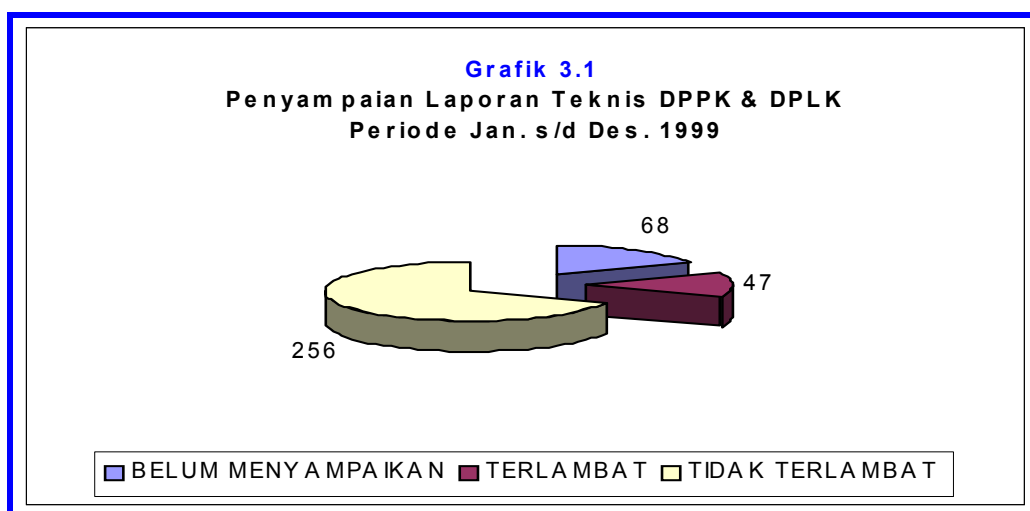
Keterangan: UC = Unit Credit PUC = Projected Unit Credit AG = Aggregated
 AA = Attained Age EA = Entry Age Proy = Proyeksi
 PBCM = Projected Benefit Cost Method

mengalami perubahan dari tahun valuasi sebelumnya. Pada valuasi tahun 1999 ini, metode pendanaan Attained Age Cost Method masih merupakan metode yang paling banyak digunakan, yaitu sekitar 35% dari seluruh Laporan Aktuaris valuasi per 31 Desember 1999 yang disampaikan, terjadi penurunan dibandingkan dengan valuasi aktuarial tahun sebelumnya (46%), meskipun tidak terlalu signifikan. Entry Age Cost Method digunakan oleh sekitar 26 Laporan Aktuaris, atau sekitar 20% dari seluruh Laporan Aktuaris yang disampaikan. Metode lainnya digunakan secara merata oleh 51 Laporan Aktuaris. Terdapat 18 Laporan Aktuaris yang menggunakan metode Projected Benefit Cost Method, tetapi tidak menjelaskan secara detail metode apa yang digunakan.



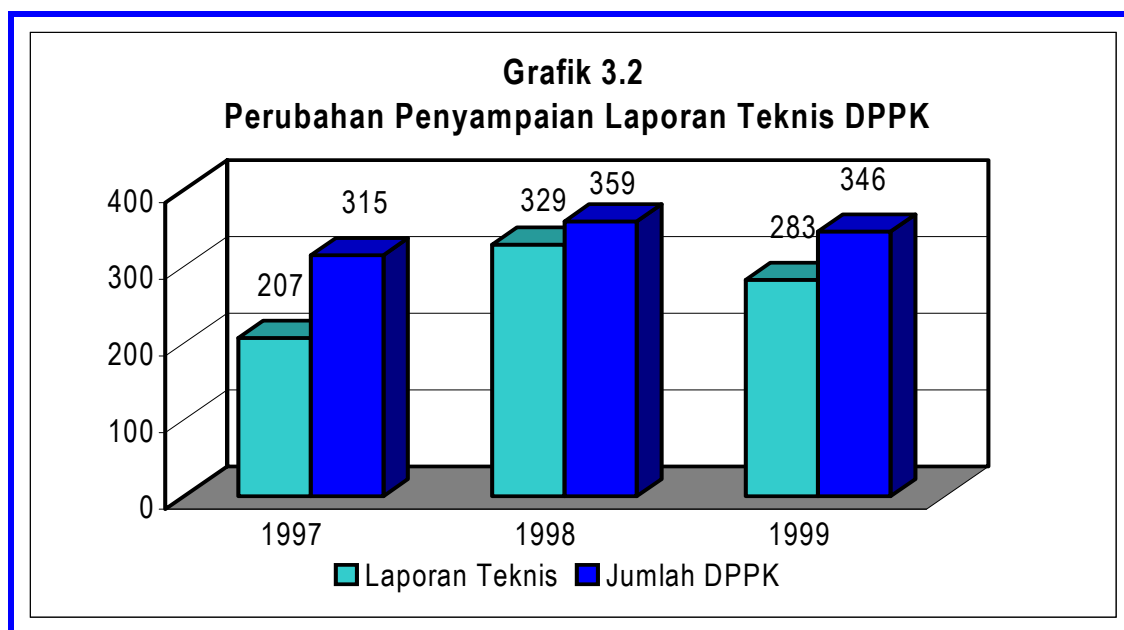
LAPORAN TEKNIS

Data yang disajikan dalam bagian ini diperoleh berdasarkan Laporan Teknis periode Januari sampai dengan Desember tahun 1999 yang disampaikan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan, sampai dengan tanggal 30 Nopember 2000.



Dari 346 DPPK, termasuk 2 Yayasan Dana Pensiun (YDP) yang masih dalam proses penyesuaian, 281 DPPK dan 2 YDP diantaranya menyampaikan laporan dan 46 laporan (16,25%) diantaranya terlambat disampaikan (melewati tanggal 30 Juni 2000). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah laporan yang disampaikan, yaitu tahun 1998 sebanyak 329 laporan yang disampaikan, namun pada tahun 1999 jumlah laporan yang disampaikan adalah sebanyak 283 laporan atau terjadi penurunan sebesar 13,98%. Dari 25 DPLK, 19 DPLK diantaranya (76%) menyampaikan laporan dan 1 laporan diantaranya (5,3%) terlambat disampaikan. Dibandingkan dengan tahun 1998, dari 25 DPLK, 21 diantaranya menyampaikan laporan (84%), ini artinya terjadi penurunan jumlah laporan yang disampaikan sebesar 9,52%.

Secara keseluruhan laporan yang disampaikan pada tahun 2000 terjadi perubahan negatif dibandingkan dengan laporan yang disampaikan dalam tahun 1999, yaitu tahun 2000 sebanyak 303 laporan dari 371 laporan yang seharusnya disampaikan (81,67%) dan tahun 1999 sebanyak 329 laporan dari 359 yang seharusnya disampaikan (91,6%), atau mengalami penurunan sebesar (7,91%). Grafik 3.1 di atas menunjukkan jumlah laporan teknis tahun 1999 yang disampaikan kepada Direktorat Dana Pensiun dalam tahun 2000 baik dari DPPK maupun DPLK.



Penyampaian Laporan Teknis DPLK

Grafik 3.2 diatas menggambarkan bahwa dari sejumlah DPPK dan Yayasan Dana Pensiun yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk melaksanakan kegiatannya , tidak semuanya menyampaikan Laporan Teknis. Pada tahun 1999 jumlah DPPK yang menyampaikan Laporan Teknis hanya sebanyak 283 DPPK dari 344 DPPK yang ada, atau sekitar 82,27%. Ini artinya terdapat penurunan sebesar 13,98% jika dibandingkan dengan tahun 1998 yang sebanyak 329 laporan yang disampaikan ke Direktorat Dana Pensiun.

❖ Dana Pensiun Pemberi Kerja

▶ Pendiri dan Mitra Pendiri

DPPK yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan sampai Desember 2000 adalah sebanyak 344, sedangkan jumlah pemberi kerja yang telah mengikutsertakan karyawannya ke DPPK yang telah berdiri (Mitra Pendiri) sebanyak 4810. Di samping itu, YDP yang pembentukan dananya telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebelum ditetapkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tanggal 20 April 1992, yang masih dalam penyesuaian sebanyak 2 buah YDP.

Tabel 3.1
Perubahan Jumlah Pendiri dan Mitra Pendiri DPPK
per Desember 1999

	BUMN	NON BUMN	JUMLAH
Jumlah Pendiri dan Mitra			
Pendiri pada akhir tahun 1998			
*Pendiri	76	249	325
*Mitra Pendiri	42	1.477	1.519
Jumlah	118	1.726	1.844
Jumlah Pendiri dan Mitra			
Pendiri per Desember 1999			
*Pendiri	62	309	371
*Mitra Pendiri	179	4.810	4.989
Jumlah	241	5.119	5.360

▶ **Karyawan DPPK**

Jumlah Karyawan DPPK (diangkat oleh Pengurus) sampai dengan akhir tahun 1999 adalah 5.237. Dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 3.935 orang, yaitu dari 1.302 menjadi 5.237 orang pada akhir tahun 1999. Pendidikan formal mereka sebagian besar adalah SMU (2.211 orang atau 42,2%). Di samping itu, terjadi peningkatan yang signifikan untuk karyawan DPPK yang telah mengikuti diklat Dana Pensiun, yaitu meningkat sebanyak 453 orang dari yang sebelumnya pada akhir tahun 1998 sebanyak 121 orang menjadi 574 orang pada akhir tahun 1999.

Tabel 3.2

Kualifikasi Pendidikan Karyawan DPPK
per 31 Desember 1999

	BUMN	NON BUMN	JUMLAH	%
Pendidikan Formal				
SD	96	171	267	5,1
SMP	214	163	377	7,2
SMU	1.299	912	2.211	42,2
Diploma	639	323	962	18,4
S1	882	459	1.341	25,6
S2	52	27	79	1,5
Jumlah	3.182	2.055	5.237	100
Pendidikan Informal				
Diklat Dana Pensiun	423	151	574	51,1
Diklat Lain	389	160	549	48,9
Jumlah	812	311	1.123	100

► Karyawan Pemberi Kerja

Dari karyawan Pendiri, 319.667 orang diantaranya adalah karyawan BUMN, dan sisanya sebanyak 190.965 orang merupakan karyawan Non BUMN. Untuk karyawan Mitra Pendiri, 254.344 orang merupakan karyawan BUMN dan sisanya sebanyak 200.483 orang adalah karyawan dari Non BUMN.

Tabel 3.3

Jumlah Karyawan Pendiri dan Mitra Pendiri DPPK
per 31 Desember 1999

	BUMN	NON BUMN	JUMLAH
Karyawan Pendiri			

Laki-laki	273.945	120.340	394.285
Wanita	42.765	38.784	81.549
Tidak Dijelaskan	2.957	31.841	34.798
Jumlah	319.667	190.965	510.632
Karyawan Mitra Pendiri			
Laki-laki	202.377	140.589	342.926
Wanita	52.007	43.073	95.080
Tidak Dijelaskan	-	16.821	16.821
Jumlah	254.344	200.483	454.827
Jumlah Karyawan	574.011	391.448	965.459

▶ **Peserta Aktif**

Jumlah Peserta Aktif Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berasal dari karyawan Pendiri dan Mitra Pendiri, per 31 Desember 1999 adalah 924.517 orang atau sekitar 95.76% dari jumlah seluruh karyawan Pemberi Kerja.

▶ **Perubahan Peserta Aktif**

Selama periode dari Januari sampai dengan Desember tahun 1999, terjadi perubahan negatif jumlah Peserta Aktif, yaitu dari 963.212 orang per awal periode (2 Januari 1999) menjadi 924.517 orang per akhir periode, atau terjadi penurunan sebanyak 38.695 orang (4,02%), perubahan tersebut yang paling dominan disebabkan oleh banyaknya Peserta Aktif yang mengalami Pensiun Ditunda sebanyak 23.934 orang (30,97%) dari total pengurangan Peserta Aktif, kemudian diikuti oleh Peserta Aktif yang berhenti bekerja < 3 tahun kepesertaan sebanyak 17.149 orang (22,19%). Sedangkan penambahan jumlah Peserta Aktif di dominasi karena memenuhi syarat kepesertaan sebanyak 35.446 orang (91,87%) dari total penambahan Peserta Aktif.

Tabel 3.4

Perubahan Peserta Aktif DPPK
per 31 Desember 1999

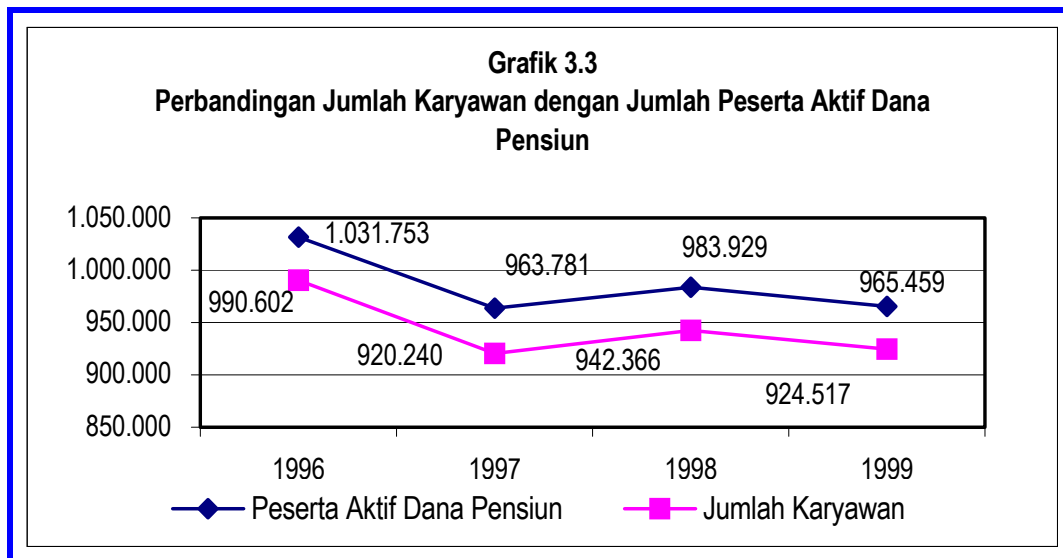
	BUMN	NON BUMN	JUMLAH
Jumlah Peserta Aktif awal tahun	575.220	387.992	963.212
Penambahan Peserta Aktif, karena:			
Memenuhi syarat kepesertaan	12.316	23.130	35.446

Pindahan dari Dana Pensiun lain	-	252	252
Penambahan Mitra Pendi	124	2.761	2.885
Jumlah Penambahan	12.440	26.143	38.583
Pengurangan Peserta Aktif, karena :			
Pensiun Dipercepat	7.232	5.736	12.968
Pensiun Normal, atau setelahnya	11.646	4.653	16.299
Pensiun Karena Cacat	116	558	674
Meninggal Dunia	1.429	1.667	3.096
Berhenti Bekerja < 3 thn kepesertaan	2.606	14.543	17.149
Pensiun Ditunda	9.370	14.564	23.934
Pengurangan Mitra Pendi	394	2.764	3.158
Jumlah Pengurangan	32.793	44.485	77.278
Jumlah Peserta Aktif akhir tahun	554.867	369.650	924.517

Tabel 3.4 diatas menunjukkan komposisi penambahan dan pengurangan jumlah Peserta Aktif DPPK yang berasal dari karyawan Pendi maupun Mitra Pendi.

▶ Jumlah Karyawan dan Jumlah Peserta Aktif Dana Pensiun

Berdasarkan grafik 3.3 di bawah ini , perbandingan antara jumlah karyawan dengan jumlah dari Peserta Aktif Dana Pensiun antara tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 menunjukkan perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena tidak semua karyawan dari Pendi Dana Pensiun mengikuti Program Pensiun. Pada tahun 1999 telah terjadi penurunan jumlah Peserta Aktif Dana Pensiun yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 1998, yaitu sebesar 17.849 orang (1,90%). Sedangkan perbedaan antara jumlah karyawan dengan Peserta Aktif Dana Pensiun adalah sebesar 40.942 orang (4,20%).



► **Penerima Manfaat Pensiun**

Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Bulanan per 31 Desember 1999 adalah 199.085 orang, terdiri dari 151.648 orang (76,17%) Pensiunan Peserta dan 47.437 orang (23,83%) Pensiunan Pihak Yang Berhak (janda/duda dan anak). Penerima Manfaat Pensiun sebagian besar berasal dari Pemberi Kerja BUMN, yaitu mencapai 185.418 orang (93,14%) dan sisanya merupakan penerima Manfaat Pensiun dari Pemberi Kerja NON BUMN.

Tabel 3.5
Penerima Manfaat Pensiun DPPK
per 31 Desember 1999

	BUMN	NON BUMN	JUMLAH
Pensiun Peserta			
Pensiun Normal	106.428	9.063	115.491
Pensiun Dipercepat	29.938	1.383	31.321
Pensiun Cacat	509	103	612
Pensiun Ditunda	2.988	1.236	4.224
Jumlah	139.863	11.785	151.648
Pihak Yang Berhak			
Pensiun Janda/Duda	43.710	1.749	45.459
Pensiun Anak	1.845	133	1.978
Jumlah	45.555	1.882	47.437
Jumlah Penerima Manfaat	185.418	13.667	199.085

► **Jenis Usaha Pemberi Kerja (Pendiri dan Mitra Pendiri)**

Dari 1.122 Pemberi Kerja (Pendiri dan Mitra Pendiri) yang telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, sebagian besar meniti usaha di bidang Infrastruktur, Utilitas & Transportasi sebesar 25,40%, kemudian diikuti berturut-turut : bidang Sosial (24,60%), bidang Aneka Industri (21%), bidang Perdagangan, Jasa & Investasi (9,20%), dan sisanya untuk usaha di bidang lainnya. Jumlah karyawan dari 1.122 pemberi kerja tersebut adalah 965.459 dan 924.517 orang (95,76%) diantaranya telah menjadi Peserta Aktif Program Pensiun. Peserta Aktif terbanyak berasal dari Pemberi Kerja yang meniti usahanya di bidang Pertanian (32,68%), kemudian diikuti berturut-turut : bidang Infrastruktur, Utilitas & Transportasi (16,24%), bidang Keuangan (12,68%), bidang Aneka Industri (13,30%) dan sisanya untuk jenis bidang usaha lainnya.

Tabel 3.6
Kepesertaan Dan Jenis Usaha Pendiri / Mitra Pendiri DPPK
per 31 Desember 1999

Jenis Usaha	Jumlah DPPK	Jumlah Pemberi Kerja	Jumlah Karyawan	Jumlah Peserta
A	26	236	129.426	122.971
B	34	12	24.004	34.864
C	33	60	57.829	41.532
D	19	285	148.428	150.108
E	82	55	139.762	117.259
F	37	103	57.522	58.094
G	8	20	54.588	53.588
H	13	48	321.030	302.172
I	10	27	11.712	10.222
J	23	276	21.158	33.707
Jumlah	285	1.122	965.459	924.517

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| A Aneka Industri | F Perdagangan, Jasa & Investasi |
| B Industri Barang Konsumsi | G Pertambangan |
| C Industri Dasar & Kimia | H Pertanian |
| D Infrastruktur, Utilitas & Transportasi | I Properti & Real Estat |
| E Keuangan | J Sosial |

❖ **Dana Pensiun Lembaga Keuangan**

▶ Peserta Aktif

Sampai dengan pertengahan Nopember 2000, Menteri Keuangan telah mengesahkan pendirian 25 Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 2 diantaranya didirikan oleh BUMN. Berdasarkan Laporan Teknis tahun 1999 yang disampaikan oleh 19 Dana Pensiun Lembaga Keuangan, terdapat 978 Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya pada Program Pensiun yang dikelola DPLK, dengan jumlah peserta karyawan sebanyak 186.576 orang (71,68%). Sementara itu jumlah Peserta Mandiri yang ikut program pensiun tersebut sebanyak 73.701 orang (28,30%).

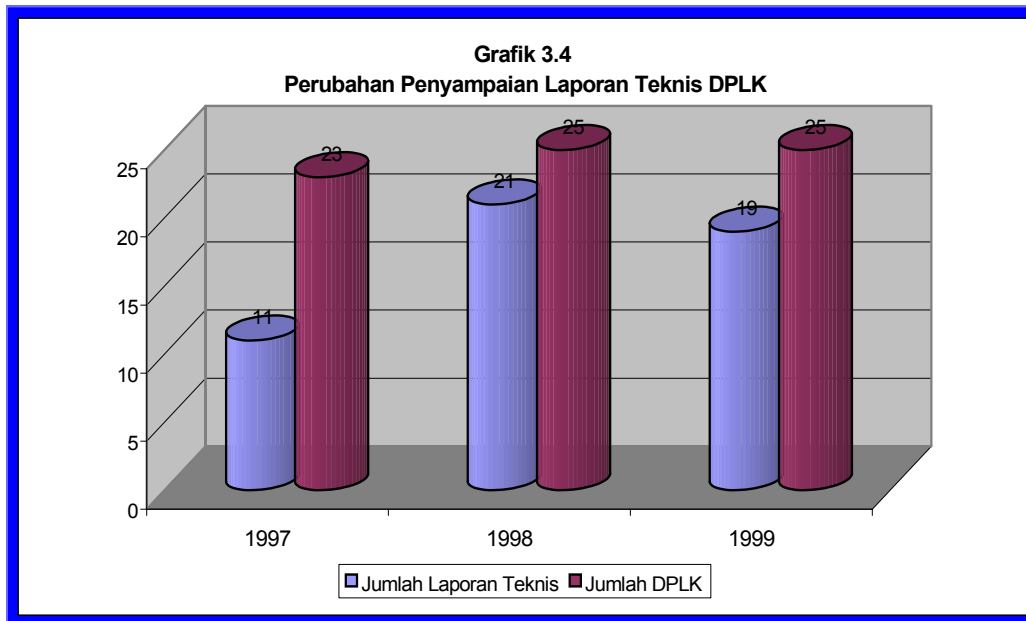
▶ Penyebaran Peserta Aktif

Komposisi Peserta Aktif dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh bank sebanyak 47.539 orang (45,93 %) adalah peserta karyawan dan 55.967 orang (54,07 %) adalah yang berasal dari Peserta Mandiri. Untuk DPLK yang didirikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa 139.037 orang berasal dari peserta karyawan (88,69 %) , dan sisanya sebesar 17.734 orang (11,31 %) berasal dari Peserta Mandiri. Dari 978 Pemberi Kerja, sebanyak 383 Pemberi Kerja (39,16 %) diantaranya mengikuti Program Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh bank, sedangkan sisanya sebanyak 595 Pemberi Kerja (60,84 %) mengikuti Program Pensiun yang didirikan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.

Tabel 3.7
Kepesertaan dan Jenis Usaha Pendiri DPLK
per 31 Desember 1999

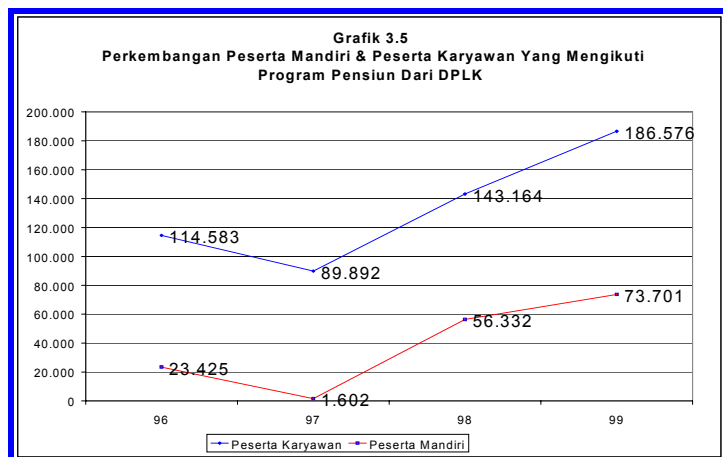
	Bank	Asuransi	Jumlah
Jumlah Laporan DPLK	3	16	19
Jumlah Pemberi Kerja	383	595	978
Jumlah Peserta Karyawan	47.539	139.037	186.576
Jumlah Peserta Mandiri	55.967	17.734	73.701
Jumlah Total Peserta	103.506	156.771	260.277

Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat mengenai kepesertaan dan jenis usaha DPLK yang telah menyampaikan Laporan Teknis per 31 Desember 1999.



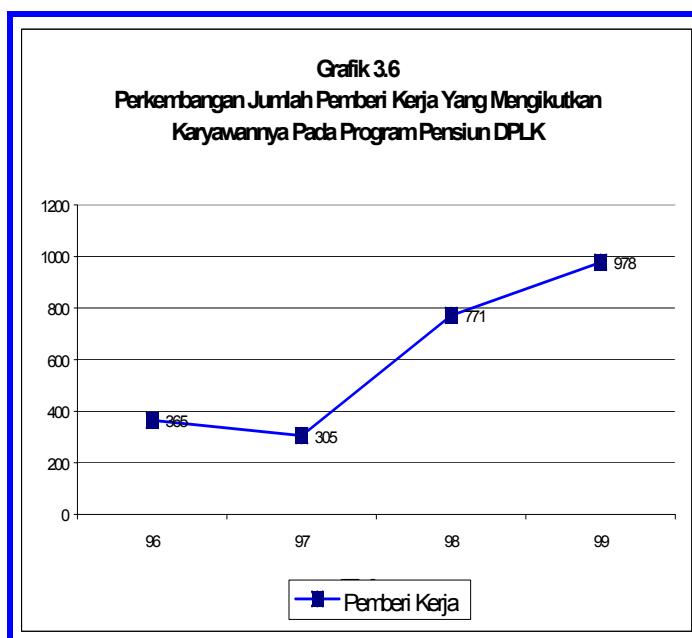
Grafik 3.4 diatas menggambarkan bahwa dari sejumlah DPLK yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk melaksanakannya, tidak semuanya menyampaikan Laporan Teknis. Pada tahun 1999 jumlah DPLK yang menyampaikan Laporan Teknis hanya sebanyak 19 DPLK, dari 25 DPLK yang ada, ini menurun sebesar 9,52% jika dibandingkan dengan tahun 1998. Pada tahun 1998, dari 25 DPLK 21 diantaranya menyampaikan Laporan Teknis.

Grafik 3.5 menunjukkan perkembangan peserta mandiri dan peserta karyawan yang mengikuti program pensiun di DPLK. Setiap tahun Industri Dana Pensiun memiliki prospek yang bagus untuk terus berkembang. Potensi tersebut terutama bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang per akhir 1999 baru



memiliki jumlah peserta sebanyak 260.277 orang. Angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pekerja mandiri Indonesia per 1999 yang berjumlah 21,7 juta jiwa. Untuk itu diperlukan kesadaran para pelaku bisnis untuk mendirikan Dana Pensiun atau mengikuti program pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selain itu perlu pula adanya peran aktif industri dalam mensosialisasikan Dana Pensiun kepada masyarakat. Setiap tahun perkembangan kepesertaan menunjukkan kecenderungan yang meningkat, kecuali untuk tahun 1997. Penurunan di tahun 1997 tidak berarti menunjukkan menurunnya kepesertaan di industri DPLK, tetapi karena laporan yang disampaikan ke Direktorat Dana Pensiun untuk tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 42% (= tahun 1996 disampaikan 19 laporan teknis sedangkan tahun 1997 disampaikan 11 laporan teknis).

Untuk grafik 3.6. di samping menunjukkan perubahan jumlah Pemberi Kerja yang mengikuti karyawannya pada Program Pensiun DPLK, juga mengalami peningkatan yang berarti, terutama tahun 1997 -1999, terjadi peningkatan sebesar 221%, yaitu dari 305 Pemberi Kerja pada tahun 1997 menjadi 978 pada tahun 1999. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 1996-1997 juga disebabkan oleh karena terjadinya penurunan jumlah laporan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan



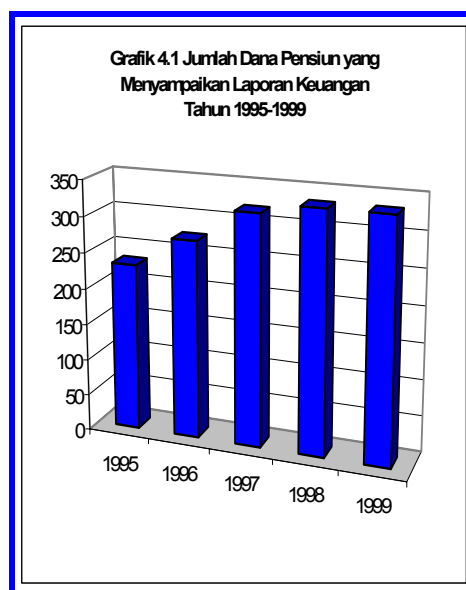
4

LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun, Pengurus Dana Pensiun mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dengan bentuk dan susunan yang berpedoman pada Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor: 2959/LK/1995 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Dana Pensiun. Kewajiban tersebut sudah mulai dilaksanakan dari tahun 1995.

Kepatuhan penyampaian laporan keuangan Dana Pensiun sesuai dengan peraturan tersebut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun secara administratif. Laporan keuangan Dana Pensiun tahun 1999 yang disampaikan sampai dengan 31 September 2000 adalah sebanyak 333 (grafik 4.1). Jumlah tersebut sama dengan tahun 1998, namun demikian sebenarnya jumlah laporan keuangan yang disampaikan Dana Pensiun tetap mengalami peningkatan karena pada selama tahun 1999 terdapat 21 Dana Pensiun yang bubar.

Kesesuaian bentuk dan susunan laporan keuangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pengurus dan akuntan mengalami peningkatan.



Secara administratif ketaatan Pengurus Dana Pensiun dalam menyampaikan laporan keuangan tahun 1999 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah laporan keuangan yang terlambat disampaikan Pengurus hanya 3 laporan, sedangkan pada tahun sebelumnya jumlahnya lebih dari 10 laporan keuangan.

❖ **Aktiva Bersih**

Aktiva bersih Dana Pensiun per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp. 26,93 trilyun. Apabila dibandingkan dengan tahun 1998, aktiva bersih Dana Pensiun selama tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 4,74 trilyun atau 21,33% (tabel 4.1). Kenaikan aktiva bersih dari tahun 1998 – 1999 lebih kecil dibandingkan kenaikan aktiva bersih dari tahun 1997-1998 (Grafik 4.2). Hal tersebut kemungkinan dikarenakan pada akhir semester tahun 1999, bunga deposito lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1998.

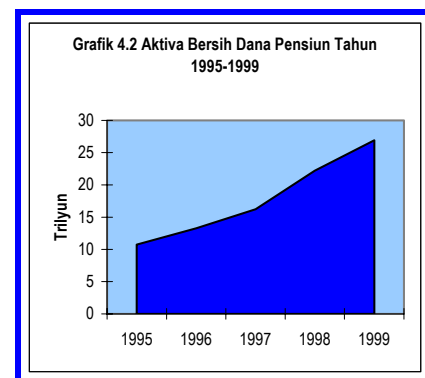
Aktiva bersih Dana Pensiun per 31 Desember 1999 adalah 2,5 kali dibandingkan aktiva bersih Dana Pensiun pada tahun 1995. Pada tahun 1995 aktiva bersih Dana Pensiun sebesar Rp. 10,74 trilyun dan pada tahun 1999 sebesar Rp. 26,93 trilyun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peningkatan aktiva bersih paling pesat terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yaitu 37,03%. Apabila tingkat pertumbuhan aktiva bersih tersebut dapat dipertahankan maka dalam lima tahun ke depan jumlah aktiva bersih Dana Pensiun dapat mencapai tiga kali dari aktiva bersih sekarang. Tingkat pertumbuhan aktiva bersih tersebut merupakan salah satu modal pembangunan dan tentunya akan membantu kebangkitan perekonomian bangsa Indonesia.

Tabel 4.1

Aktiva Bersih Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 1995-1999

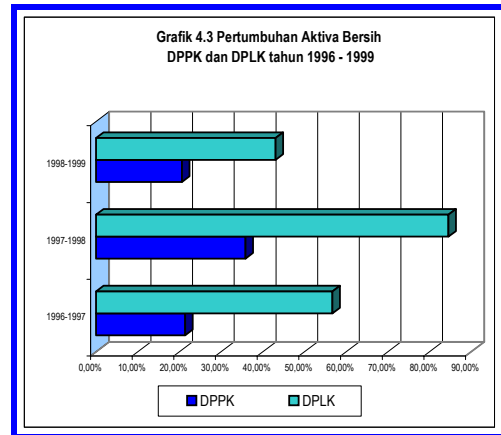
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Dana Pensiun	Aktiva Bersih	Perubahan
1995	232	10.747.726,67	--
1996	274	13.272.992,19	23,50%
1997	319	16.200.404,50	22,06%
1998	333	22.199.001,06	37,03%
1999	333	26.934.945,79	21,33%



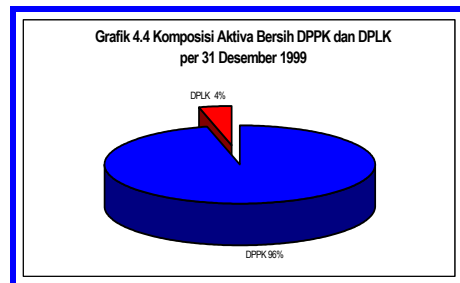
Pensiun Pemberi Kerja selama empat tahun terakhir. Dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 jumlah aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan meningkat sebesar 400% dari Rp. 247,85 miliar pada tahun 1996 menjadi Rp. 1,02 trilyun pada tahun 1999. Pertumbuhan aktiva bersih Dana Pensiun

Lembaga Keuangan mengalami peningkatan paling pesat terjadi selama tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yaitu sebesar 85,15%.

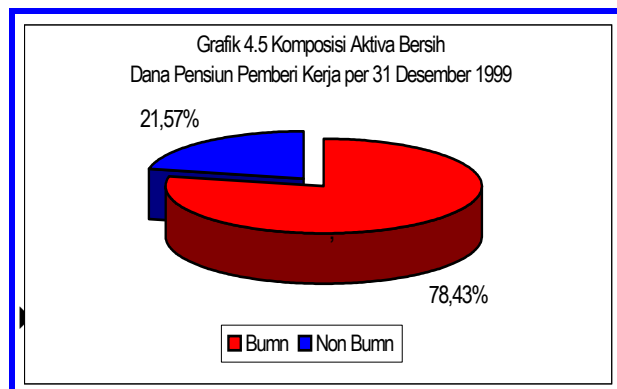


Sedangkan pertumbuhan aktiva bersih Dana Pensiun Pemberi Kerja dari tahun 1996 sampai tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 98,92% yaitu dari Rp. 13,03 trilyun pada tahun 1996 menjadi Rp. 25,91 trilyun pada tahun 1999. Peningkatan paling pesat terjadi selama tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yaitu sebesar 35,86%.

Aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp. 1,03 trilyun atau 3,81% dari keseluruhan aktiva bersih Dana Pensiun (grafik4.4). Komposisi aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut mengalami perubahan dibandingkan posisi aktiva bersih per 31 Desember 1998 dimana aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebesar 3,25% dari keseluruhan aktiva bersih.



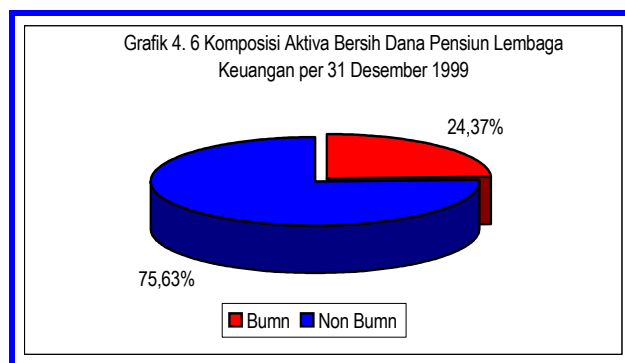
Pada tabel 4.2 terlihat bahwa pertumbuhan aktiva bersih Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pendirinya non BUMN lebih pesat dibandingkan Dana



Pensiun Pemberi Kerja yang pendirinya BUMN. Namun demikian peningkatan aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya BUMN lebih pesat dibandingkan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang Pendirinya non BUMN.

Komposisi aktiva bersih Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pendirinya BUMN per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp. 20,32 trilyun atau 78,43% dari total keseluruhan aktiva bersih Dana Pensiun Pemberi Kerja (grafik 4.5). Namun demikian pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, komposisi aktiva bersih terbesar adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya non BUMN per 31 Desember 1999 adalah sebesar Rp. 249,87 milyar atau 76% dari total aktiva bersih Dana Pensiun (grafik 4.6)

Aktiva Bersih Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) per 31 Desember 1999 adalah Rp. 1,66 trilyun atau 6,17% dari total aktiva bersih Dana Pensiun. Proporsi tersebut sangat kecil dibandingkan dengan proporsi aktiva bersih Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per 31 Desember 1999 adalah Rp. 25,27 trilyun atau 93,83% dari total aktiva bersih Dana Pensiun (tabel 4.3).



Tabel 4.2

Kualifikasi Aktiva Bersih Dana Pensiun Berdasarkan jenis Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 1996-1999

(dalam jutaan rupiah)

	Jumlah Dana Pensiun				Aktiva Bersih			
	1996	1997	1998	1999	1996	1997	1998	1999
Dana Pensiun Pemberi Kerja								
BUMN	48	62	66	71	11.024.099,13	12.991.521,14	17.018.245,80	20.320.072,65
Non BUMN	209	238	244	239	2.001.035,29	2.820.490,60	4.464.039,57	5.589.423,42

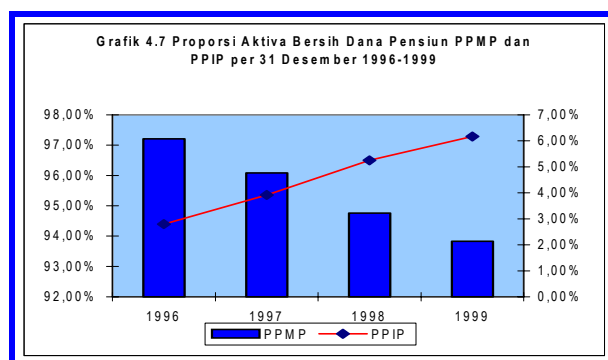
Total DPPK	257	300	310	310	13.025.134,42	15.812.011,74	21.482.285,37	25.909.496,07
Dana Pensiun Lembaga Keuangan								
BUMN	2	2	2	2	32.812,49	61.654,26	130.973,81	249.878,49
Non BUMN	15	17	18	21	215.045,27	326.738,50	585.741,88	775.571,23
Total DPLK	17	19	20	23	247.857,76	388.392,76	716.715,69	1.025.449,72
Total	274	319	330	333	13.272.992,18	16.200.404,50	22.199.001,06	26.934.945,79

Tabel 4.3

Kualifikasi Aktiva Bersih Dana Pensiun Berdasarkan Jenis Program Pensiun per 31 Desember 1996-1999

	1996	1997	1998	1999
Dana Pensiun PPMP	12.902.221,73	15.566.279,43	21.034.490,13	25.273.178,85
Dana Pensiun PPIP	370.770,46	634.125,07	1.164.510,93	1.661.766,94
Total	13.272.992,19	16.200.404,50	22.199.001,06	26.934.945,79

Pada grafik 4.7 terlihat bahwa proporsi aktiva bersih Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti terus mengalami penurunan sejak mulai tahun 1996 hingga 1999. Pada tahun 1996 aktiva bersih Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti adalah sebanyak 97,21% dan terus mengalami penurunan hingga 93,83% di tahun 1999. Sebaliknya, proporsi kekayaan Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti terus meningkat.



Untuk posisi per 31 Desember 1999, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mempunyai aktiva bersih terbesar adalah Dana Pensiun Bank Negara Indonesia yaitu Rp. 2,18 trilyun, disusul Dana Pensiun Pertamina dengan aktiva bersih Rp. 1,99 trilyun dan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia dengan aktiva bersih Rp. 1,98 trilyun. Aktiva bersih terbesar Dana Pensiun yang pendirinya non BUMN adalah Dana Pensiun Caltex yaitu sebesar Rp. 671,62 milyar. Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang mempunyai aktiva bersih terbesar adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri yaitu sebesar Rp. 341,98 milyar dan peringkat kedua adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI dengan aktiva bersih Rp. 200,74 milyar.

❖ **Investasi dan Aktiva Bersih**

Perbandingan Investasi per Aktiva Bersih Dana Pensiun per 31 Desember 1999 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tabel 4.4 terlihat bahwa untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja, proporsi investasi dalam aktiva bersih adalah sebanyak 97,04%, meningkat sebesar 2,00% dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 95,58% di tahun 1998 menjadi 80,79% di tahun 1999. Penurunan ini terutama bersumber dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang Pendirinya Non BUMN yaitu dari 95,29% per 31 Desember 1998 menjadi 74,80% per 31 Desember 1999.

Tabel 4.4

Perbandingan Aktiva Bersih dengan Investasi Dana Pensiun per 31 Desember Tahun 1996-1999

	1996	1997	1998	1999
Dana Pensiun Pemberi Kerja	93,30%	93,34%	95,04%	97,04%
BUMN	95,89%	96,45%	96,07%	98,07%
Non BUMN	90,70%	90,23%	91,11%	93,29%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	96,73%	97,33%	95,58%	80,79%
BUMN	96,43%	97,44%	96,90%	99,38%
Non BUMN	97,02%	97,22%	95,29%	74,80%

❖ **Kewajiban Aktuarial (PPMP) atau Kewajiban Manfaat Pensiun (PPIP) dan Selisih Kewajiban Aktuarial (PPMP)**

Kewajiban Aktuarial/ Manfaat Pensiun per 31 Desember 1999 adalah Rp 24,93 trilyun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4,13 trilyun atau 19,86%. Kenaikan kewajiban Aktuarial/Manfaat Pensiun tersebut lebih kecil dari tahun 1997-1998 yang besarnya 30,50%(tabel 4.5). Perbandingan aktiva bersih dengan kewajiban aktuarial juga mengalami peningkatan dari tahun 1998. Pada tahun 1998 sebesar Rp. 106,74% dan pada tahun 1999 naik menjadi 108,06%.

Tabel 4.5

Kewajiban Aktuarial/Manfaat Pensiun Dana Pensiun per 31 Desember 1995-1999

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	1995	1996	1997	1998	1999
Kewajiban Aktuarial/Manfaat Pensiun	13.903.030,15	14.295.950,68	15.936.536,56	20.797.254,58	24.926.940,82
Perubahan Kewajiban Aktuarial/Manfaat Pensiun	--	2,83%	11,48%	30,50%	19,86%
Perbandingan Aktiva Bersih dengan Kewajiban Aktuarial	77,30%	92,84%	101,66%	106,74%	108,06%
Perubahan Perbandingan Aktiva Bersih dengan Kewajiban Aktuarial	--	20,10%	9,49%	5,00%	1,23%

Kenaikan selisih kewajiban aktuarial per 31 Desember 1999 mengalami peningkatan yang paling tinggi dari tahun 1996 sampai 1999 yaitu sebesar Rp. 1,27 triliun. Selama empat tahun terakhir kondisi Dana Pensiun secara keseluruhan mengalami peningkatan dari defisit Rp. 1,02 triliun pada tahun 1996 menjadi surplus Rp. 1,96 triliun pada tahun 1999.

Dana Pensiun yang mempunyai surplus tertinggi adalah Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dengan surplus sebesar Rp. 922,07 milyar, Dana Pensiun Telkom mempunyai surplus Rp. 419,60 milyar, dan Pertamina mempunyai surplus Rp. 349,66 milyar. Sedangkan Dana Pensiun yang mempunyai defisit tertinggi adalah Dana Pensiun Perkebunan yaitu Rp. 455 milyar, peringkat kedua adalah Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia yaitu Rp. 342 milyar dan peringkat ketiga adalah Dana Pensiun Bank Indonesia yaitu sebesar Rp. 142 milyar.

Tabel 4.6
Selisih Kewajiban Aktuarial Dana Pensiun
per 31 Desember Tahun 1995-1999

Tahun	(dalam jutaan rupiah)	
	Selisih Kewajiban Aktuarial	Perubahan
1996	1.017.347,06	--
1997	(236.638,06)	1.253.985,15
1998	(690.266,73)	453.628,67
1999	(1.964.066,91)	1.273.800,18

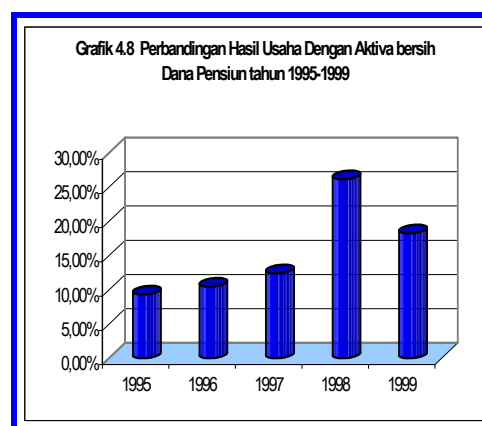
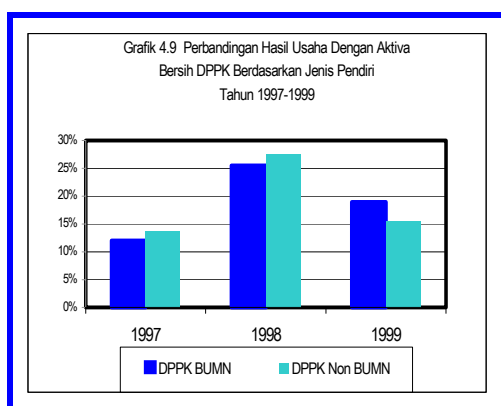
❖ Hasil Usaha

Hasil Usaha Dana Pensiun setelah pajak selama tahun 1999 adalah Rp 4,91 triliun. Berarti apabila dibandingkan dengan tahun 1998 mengalami penurunan sebesar Rp 8,842 milyar dari Rp 5,79 triliun (tabel 4.7). Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan bunga deposito yang mulai menurun pada semester terakhir tahun 1998 dan instrumen investasi lain seperti saham masih belum menunjukkan iklim yang kondusif.

Tabel 4.7
Perbandingan Hasil Usaha dengan Aktiva Bersih Dana Pensiun
Tahun 1995-1999

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Hasil Usaha setelah pajak	Perbandingan Hasil Usaha Setelah pajak dengan Aktiva Bersih	Perubahan Hasil Usaha setelah pajak
1995	97.670,00	9,28%	--
1996	1.387.006,56	10,45%	39,02%
1997	2.005.464,15	12,38%	44,59%
1998	5.795.866,24	26,11%	189,00%
1999	4.911.673,36	18,24%	-15,26%



Perbandingan hasil usaha setelah pajak dengan aktiva bersih pada tahun 1999 sebesar 18,24 %. Perbandingan hasil usaha setelah pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan

tahun 1998 yang besarnya mencapai 26,11% dimana perbandingan hasil usaha setelah pajak dengan aktiva bersih tersebut adalah yang terbesar selama lima tahun terakhir.

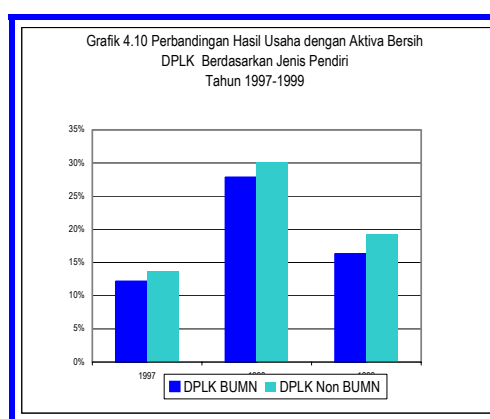
Tabel 4.8
Perbandingan Hasil Usaha dengan Aktiva Bersih
berdasarkan Jenis Dana Pensiun
Tahun 1997-1999

Jenis Dana Pensiun	Hasil Usaha		
	1997	1998	1999
Dana Pensiun Pemberi Kerja			
BUMN	1.565.813,74	4.349.390,53	3.856.259,89
Non BUMN	387.329,11	1.233.824,72	865.828,52
Total DPPK	1.953.142,85	5.583.215,25	4.722.088,41
Dana Pensiun Lembaga Keuangan			
BUMN	7.487,22	36.449,62	40.738,07
Non BUMN	44.834,08	176.201,38	148.846,87
Total DPLK	52.321,30	212.651,00	189.584,94
Total Dana Pensiun	2.005.464,15	5.795.866,25	4.911.673,35

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa perbandingan hasil usaha setelah pajak dengan aktiva bersih Dana Pensiun tahun 1999 pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pendirinya BUMN lebih tinggi (18,98%) dibandingkan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pendirinya non BUMN (15,49%).

Perbandingan hasil usaha dengan aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja dari tahun 1997-1999. Pada tahun 1999, perbandingan hasil usaha dengan aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah sebesar 18,49% sedangkan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja sebesar 18,23%.

Sebagaimana terdapat pada grafik 4.9, perbandingan hasil usaha dengan aktiva bersih Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pendirinya non BUMN lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pendirinya BUMN pada tahun 1997 dan



1998. Namun demikian pada tahun 1999 ternyata perbandingan hasil usaha Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pendirinya BUMN (18,98%) lebih besar dibandingkan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Pendirinya Non BUMN (15,49%).

Pada grafik 4.10 terlihat bahwa perbandingan hasil usaha dengan aktiva bersih Dana Pensiun Lembaga Keuangan non BUMN lebih besar dibandingkan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya BUMN selama tiga tahun terakhir (1997-1999).

Tabel 4.9

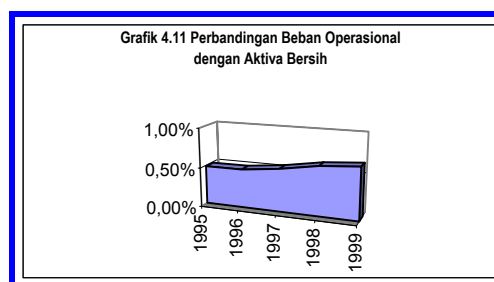
Perbandingan Hasil Usaha dengan Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Program Pensiun Tahun 1997-1999

Jenis Program Pensiun	Hasil Usaha Setelah Pajak			Perbandingan Hasil Usaha Setelah Pajak dengan Aktiva Bersih		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
PPMP	1.919.795,31	5.450.498,96	4.595.660,82	12,33%	25,91%	18,18%
PPIP	85.668,84	345.367,29	316.012,53	13,51%	29,66%	19,02%
Total Hasil Usaha	2.005.464,15	5.795.866,25	4.911.673,35	--	--	--

Berdasarkan jenis program pensiun, perbandingan hasil usaha dengan aktiva bersih Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun Iuran Pasti lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat Pasti dilihat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 (tabel 4.9). Pada tahun 1999, perbandingan hasil usaha setelah pajak dengan aktiva bersih pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti adalah 19,02% dan perbandingan hasil usaha setelah pajak dengan aktiva bersih pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sebesar 18,18%.

❖ **Beban Operasional**

Beban operasional secara nominal pada tahun 1999 meningkat Rp. 39 milyar atau 5,72% dibandingkan dengan tahun 1998. Namun demikian secara nominal peningkatan tersebut lebih kecil dibandingkan



peningkatan beban operasional pada tahun 1996-1997 dan 1997-1998.

Perbandingan beban operasional dengan aktiva bersih pada tahun 1999 mengalami peningkatan yang tertinggi selama 4 tahun terakhir yaitu dari 0,62% pada tahun 1998 menjadi 0,66% pada tahun 1999 (grafik 4.10)

Tabel 4.10
Perbandingan Beban Operasional dengan Aktiva Bersih
berdasarkan Jenis Kepemilikan Dana Pensiun
Tahun 1997-1999

Jenis Dana Pensiun	Beban Operasional			Perbandingan Beban Operasional dengan Aktiva Bersih		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
Dana Pensiun Pemberi Kerja						
BUMN	60.835,49	94.986,11	121.281,92	0,47%	0,56%	0,60%
Non BUMN	24.901,81	39.129,65	48.151,11	0,88%	0,88%	0,86%
Total DPPK	85.737,30	134.115,76	169.433,03	0,54%	0,62%	0,65%
Dana Pensiun Lembaga Keuangan						
BUMN	448,30	917,29	2.022,71	0,73%	0,70%	0,81%
Non BUMN	1.817,41	3.158,17	5.812,77	0,56%	0,54%	0,75%
Total DPLK	2.265,71	4.075,46	7.835,48	0,58%	0,57%	0,76%
Total	88.003,00	138.191,22	177.268,51	0,54%	0,62%	0,66%

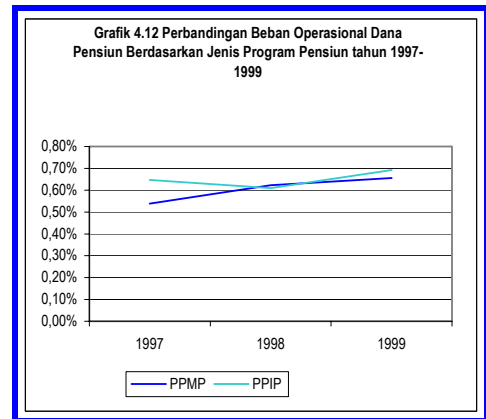
Pada tabel 4.10 terlihat bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pendirinya BUMN mempunyai beban operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pendirinya non BUMN dari tahun 1997 sampai tahun 1999. Namun demikian pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang terjadi adalah sebaliknya, Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya non BUMN mempunyai perbandingan beban operasional dengan aktiva bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya BUMN dari tahun 1997 sampai tahun 1999. Dengan kata lain Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya non BUMN dalam mengelola Dana Pensiun lebih efisien dibandingkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendirinya BUMN.

Tabel 4.11

Perbandingan Beban Operasional dengan Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Program Pensiun Tahun 1997-1999

Jenis Program Pensiun	Beban Operasional			Perbandingan Beban Operasional dengan Aktiva Bersih		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
PPMP	83.900,39	131.094,14	165.765,86	0,54%	0,62%	0,66%
PIIP	4.102,61	7.097,08	11.502,66	0,65%	0,61%	0,69%
Total	88.003,00	138.191,22	177.268,51	0,54%	0,62%	0,66%

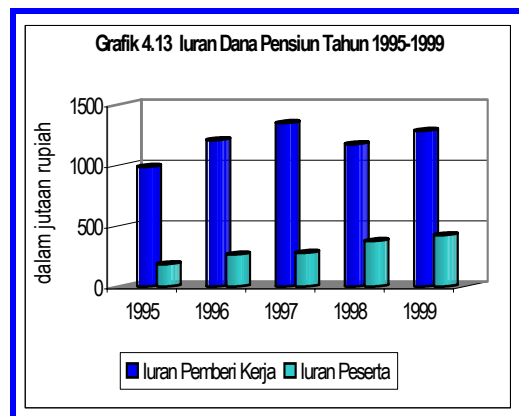
Perbandingan beban operasional dengan aktiva bersih Dana Pensiun dengan program pensiun PPMP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 setiap tahun mengalami peningkatan sedangkan pada Dana Pensiun dengan program pensiun iuran pasti pada tahun 1997-1998 mengalami penurunan tetapi pada tahun 1998-1999 mengalami peningkatan (grafik 4.11)



Pada tahun 1997 perbandingan beban operasional dengan aktiva bersih Dana Pensiun program pensiun iuran pasti lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Pensiun program pensiun manfaat pasti. Pada tahun 1998 terjadi sebaliknya, perbandingan beban operasional dengan aktiva bersih antara Dana Pensiun dengan program pensiun iuran pasti sedikit lebih rendah dibanding Dana Pensiun dengan program pensiun manfaat pasti. Namun demikian pada tahun 1999, perbandingan beban operasional dengan aktiva bersih Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti lebih tinggi dibandingkan Dana Pensiun dengan program pensiun iuran pasti.

❖ **Iuran**

Sebagaimana terlihat pada tabel 4.12, total iuran Dana Pensiun jatuh tempo pada tahun 1999 adalah sebesar



1,7 trilyun atau meningkat 10,30% dibandingkan dengan tahun 1998.

Iuran pemberi kerja pada tahun 1999 adalah sebesar Rp.1,28 trilyun yang berarti meningkat dibandingkan tahun 1998. Namun demikian besarnya iuran jatuh tempo tahun 1999 lebih kecil dibandingkan dengan iuran jatuh tempo tahun 1997. Sedangkan Iuran Peserta jatuh tempo pada tahun 1999 adalah yang terbesar selama lima tahun terakhir

Tabel 4.12
Penerimaan Iuran Dana Pensiun
Tahun 1995-1999

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Iuran Pemberi Kerja	Iuran Peserta	Total Iuran	Perubahan Total Iuran
1995	987.174,48	184.735,10	1.171.909,58	--
1996	1.207.816,73	263.753,49	1.471.570,22	25,57%
1997	1.347.857,97	278.107,14	1.625.965,11	10,49%
1998	1.174.629,59	374.903,45	1.549.533,04	-4,70%
1999	1.284.624,59	424.456,75	1.709.081,34	10,30%

❖ **Manfaat Pensiun**

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa pembayaran Manfaat Pensiun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara nominal. Namun demikian kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 1998-1999 dimana secara prosentase mengalami kenaikan terbesar selama lima tahun terakhir yaitu 33,85% dan secara nominal kenaikan yang terjadi adalah Rp. 640 milyar atau lebih besar dari pembayaran Manfaat Pensiun pada tahun 1995.

Kenaikan tersebut kemungkinan terjadi karena meningkatnya jumlah pensiunan akibat banyaknya peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat krisis moneter 2 tahun terakhir ini. Kemungkinan lain adalah peningkatan besarnya manfaat pensiun pada beberapa Dana Pensiun.

Tabel 4.13
Manfaat Pensiun Dana Pensiun
Tahun 1995-1999

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pembayaran Manfaat Pensiun	Perubahan
1995	594.402,53	--
1996	810.472,03	26,66%
1997	934.603,81	13,28%
1998	1.250.338,37	25,25%
1999	1.890.259,21	33,85%

❖ Aktiva Bersih, Kewajiban, Kinerja, dan Jenis Usaha Pendiri

Sebagaimana terdapat pada tabel 4.14, bidang usaha yang mempunyai Dana Pensiun terbanyak adalah bidang usaha perbankan dengan jumlah Dana Pensiun sebanyak 64 Dana Pensiun. Proporsi aktiva bersih terbesar juga ditempati Dana Pensiun yang Pendirinya mempunyai bidang usaha perbankan yaitu Rp. 10,44 trilyun atau 38,78% dari total aktiva bersih Dana Pensiun, demikian pula dengan kewajiban aktuarial dan selisih kewajiban aktuarial. Namun demikian rata-rata aktiva bersih pada Dana Pensiun dengan pendiri yang mempunyai bidang usaha perbankan ini hanya Rp. 163 milyar. Dengan kata lain perusahaan yang mempunyai bidang usaha perbankan mempunyai Dana Pensiun terbanyak tetapi aktiva bersihnya relatif kecil. Hasil Usaha Dana Pensiun ini dibandingkan aktiva bersih menempati urutan keenam yaitu sebesar 18,00% dan beban operasional dibandingkan aktiva bersih sebesar 0,55%

Tabel 4.14

Aktiva Bersih, Kewajiban Aktuarial/Manfaat Pasti, dan Selisih Kewajiban Aktuarial Dana Pensiun berdasarkan jenis usaha Pendiri per 31 Desember 1999

Jenis Usaha	Jumlah Dana Pensiun	Aktiva Bersih	Kewajiban Aktuarial/ Kewajiban Manfaat Pensiun	Selisih Kewajiban Aktuarial	dalam ribuan Rp
					Rata-rata Aktiva Bersih
Aneka Industri	28	1.508.027,33	1.146.745,90	(361.281,43)	53.858,12
Asuransi	37	1.490.121,71	1.328.585,38	(139.200,30)	40.273,56
Industri Barang Konsumsi	37	393.307,79	408.641,73	14.060,50	10.629,94
Industri Dasar & Kimia	38	1.793.047,11	1.574.979,70	(212.861,48)	47.185,45
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	26	4.492.066,48	3.810.115,78	(670.027,66)	172.771,79
Perbankan	64	10.446.898,13	9.764.213,53	(679.555,76)	163.232,78
Perdagangan, Jasa & Investasi	40	1.045.089,16	981.620,21	(61.001,36)	26.127,23
Pertambangan	10	3.080.585,02	2.802.950,03	(277.634,98)	308.058,50
Pertanian	17	1.706.861,84	2.195.234,78	488.372,95	100.403,64
Properti & Real Estate	10	213.321,44	199.555,24	(13.766,19)	21.332,14
Sosial	26	765.619,80	714.298,53	(51.171,19)	29.446,92
Total	333	26.934.945,79	24.926.940,82	(1.964.066,91)	--

Dana Pensiun yang Pendirinya mempunyai bidang usaha infrastruktur, utilitas, dan transportasi menempati urutan aktiva bersih terbesar kedua dengan total aktiva bersih sebesar Rp. 4,49 trilyun dan jumlah Dana Pensiun sebanyak 26 Dana Pensiun, sehingga rata-rata aktiva bersihnya Rp. 172,77 milyar. Kinerja hasil usaha dibanding aktiva bersih pada Dana Pensiun ini menempati urutan tertinggi kedua yaitu 20,16%, namun demikian beban operasional dibandingkan aktiva bersih menempati tertinggi ketiga sebesar 0,87%.

Dana Pensiun yang pendirinya berbidang usaha pertambangan adalah Dana Pensiun yang menempati rating ketiga dari jumlah aktiva bersihnya. Jumlah perusahaan pada bidang ini yang mendirikan Dana Pensiun hanya 10 Dana Pensiun, namun demikian jumlah rata-rata aktiva bersihnya paling besar yaitu Rp. 308,06 milyar. Dana Pensiun ini adalah Dana Pensiun yang beban operasional dibanding aktiva bersihnya terendah yaitu 0,29%, sedangkan hasil usaha dibandingkan aktiva bersihnya sebesar 17,95%.

Tabel 4.15
Rata-rata Hasil Usaha dan Beban Operasional
Dana Pensiun tahun 1999

Jenis Usaha	Rata-rata hasil Usaha/ Aktiva Bersih	Rata-rata Beban Operasional/ Aktiva Bersih
Aneka Industri	18,81%	0,53%
Asuransi	18,82%	1,04%
Industri Barang Konsumsi	16,61%	1,06%
Industri Dasar & Kimia	19,32%	0,88%
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	20,16%	0,87%
Perbankan	18,00%	0,55%
Perdagangan, Jasa & Investasi	20,51%	0,95%
Pertambangan	17,95%	0,29%
Pertanian	16,48%	0,59%
Properti & Real Estate	17,55%	1,26%
Sosial	8,34%	0,79%

Pada tabel 4.15 terlihat bahwa Dana Pensiun yang mempunyai hasil usaha tertinggi adalah Dana Pensiun yang pendirinya mempunyai bidang usaha Perdagangan, jasa dan investasi yaitu 20,51%. Sedangkan Dana Pensiun yang hasil usaha dibandingkan aktiva bersihnya terendah adalah Dana Pensiun yang pendirinya bergerak di bidang sosial yaitu 8,34%.

Beban operasional dibandingkan aktiva bersih terendah adalah Dana Pensiun yang pendirinya bergerak di bidang pertambangan yaitu 0,29%, sedangkan beban operasional dibanding aktiva bersih tertinggi adalah 1,26% yang dimiliki Dana Pensiun dengan pendiri berbidang usaha properti dan real estate.

5 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI

Sejalan dengan keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik setelah berakhirnya masa kerja, keberadaan Dana Pensiun dianggap penting. Hal ini terbukti dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan semakin besarnya kekayaan Dana Pensiun di Indonesia dari tahun ke tahun. Dengan bertambahnya kekayaan Dana Pensiun semakin besar pula proporsi dana yang diinvestasikan ke berbagai jenis investasi yang sesuai dengan UU Dana Pensiun No.11 Th.1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.296/KMK.017/2000.

Peningkatan jumlah investasi Dana Pensiun dapat dilihat pada tabel 5.1. Jumlah investasi tahun 1997 sebesar 15,44 trilyun. Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 5,63 trilyun atau sebesar 36,46%, jumlah investasi pada tahun 1998 ini sebesar 21,07 trilyun. Sedangkan untuk tahun 1999 peningkatan tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,84 trilyun atau sebesar 22,97% dari total investasi tahun 1998. Jumlah total investasi tahun 1999 sebesar 25,93 trilyun dari 322 (tiga ratus dua puluh dua) Dana Pensiun yang menyampaikan laporan portofolio

investasi. Peningkatan jumlah investasi Dana Pensiun tahun 1999 lebih kecil dibanding dengan peningkatan jumlah investasi tahun 1998 disebabkan oleh adanya penurunan tingkat bunga Deposito pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui deposito berjangka tetap menjadi prioritas utama investasi Dana Pensiun dari berbagai pilihan jenis investasi yang ditawarkan. Hal tersebut kemungkinan karena jenis investasi ini lebih aman dan hasil yang diberikan dapat diketahui secara pasti. Disamping itu keadaan negara yang mengalami krisis beberapa tahun belakangan ini membuat Dana Pensiun menempatkan sebagian besar dananya pada investasi jenis ini (deposito). Namun demikian tidak menutup kemungkinan Dana Pensiun akan menempatkan investasinya pada jenis investasi lain sebagai alternatif, apabila menurut mereka hasil yang akan diberikan lebih menarik.

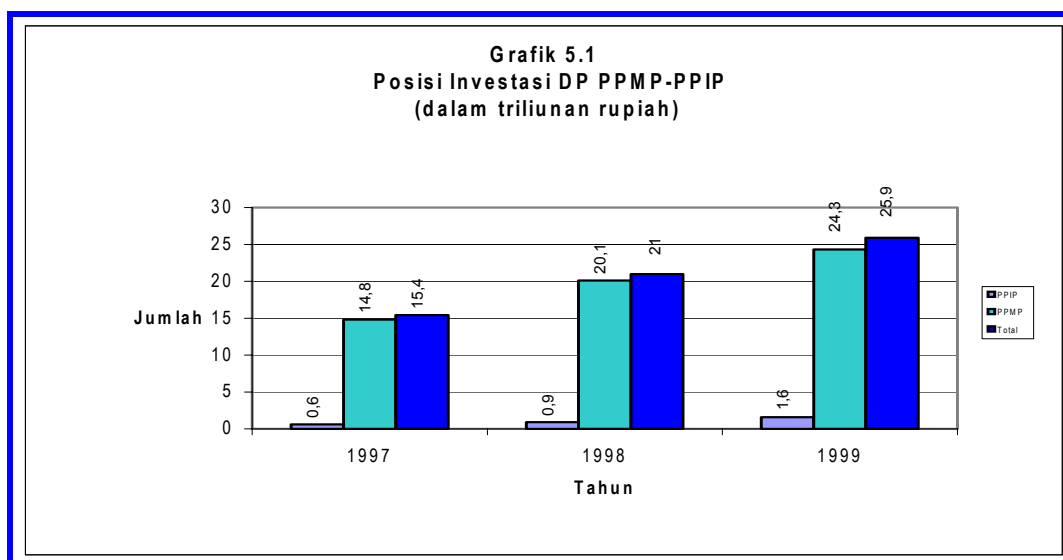
Pada tabel 5.1 terlihat bahwa jumlah investasi Dana Pensiun dalam Deposito Berjangka dari tahun 1997-1999 terus mengalami peningkatan. Tahun 1997 sebesar Rp 8,7 trilyun meningkat menjadi Rp 14,9 trilyun pada tahun 1998 dan di tahun 1999 menjadi Rp 18,2 trilyun. Investasi pada Deposito Berjangka meskipun masih merupakan pilihan utama dalam investasi tetapi dibandingkan dengan tahun 1998 mengalami penurunan yang relatif kecil yaitu hanya sebesar 1%, sedangkan Saham, Obligasi dan Surat Berharga Lain yang diperdagangkan di Pasar Modal merupakan pilihan berikutnya menunjukkan peningkatan (setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan) yaitu dari 10% pada tahun 1998 menjadi 12,1% pada tahun 1999. Ini merupakan hal yang positif dengan meningkatnya kepercayaan terhadap instrumen investasi tersebut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Total Investasi DPPK dan DPLK
Tahun 1997-1999

(dalam jutaan rupiah)

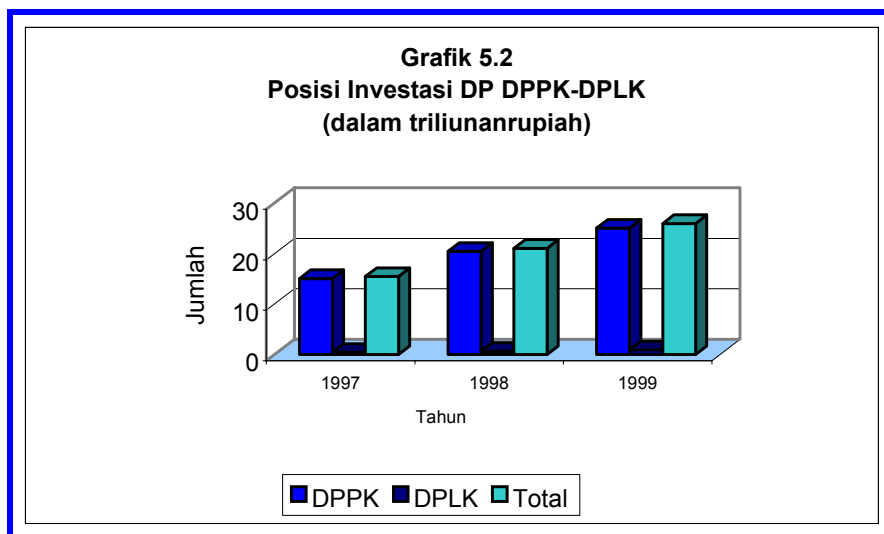
NO	JENIS INVESTASI	TAHUN					
		1997	%	1998	%	1999	%
1	Deposito	8.789.900	57%	14.905.765	71%	18.227.903	70%
2	Sertifikat Deposito	35.768	0,23%	19.784	0,1%	2.345	0,01%
3	Saham	1.063.956	7%	980.305	5%	1.588.854	6,13%
4	Obligasi	1.402.090	9%	1.125.520	5%	1.512.133	6%

5	Surat Berharga	5	0%	3.174	0%	2.222	0,01%
6	SBPU	0	0%	0	0%	0	0%
7	Surat Pengakuan Hutang	130.409	0,84%	236.363	1,1%	238.620	0,92%
8	Penempatan Langsung	1.824.186	12%	1.588.859	8%	1.985.707	8%
9	Danareksa	3.144	0,02%	422	0%	0	0%
10	Reksadana	223.814	1,45%	109.636	0,5%	292.517	1,13%
11	Tanah dan Bangunan	1.969.326	13%	2.105.917	10%	2.079.878	8%
Total		15.442.598	100%	21.075.745	100%	25.932.179	100%



Investasi pada Tanah dan Bangunan menduduki peringkat ketiga akan tetapi jumlahnya semakin menurun dari tahun ke tahun, dari 10% pada tahun 1998 menjadi 8% pada tahun 1999. Hal ini diakibatkan karena jenis investasi ini masih dianggap kurang menguntungkan bagi Dana Pensiun untuk mengembangkan dana yang ada. Sedangkan investasi pada Penempatan langsung relatif sama besarnya dengan tahun 1998. Jenis investasi lainnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berdasarkan jenis program, Jumlah Investasi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) lebih besar dibandingkan dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dalam Grafik 5.1 tampak bahwa dari total investasi sebesar Rp 25,9 triliun pada tahun 1999, terdapat 94% atau sebesar Rp 24,3 triliun merupakan investasi Dana Pensiun dengan Program Manfaat Pasti. Pada grafik disamping dapat juga dilihat bahwa di tahun 1997&1998 PPMP jauh lebih besar dari PPIP. Berdasarkan jenis Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) mempunyai investasi jauh lebih besar dibandingkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Investasi DPPK pada tahun 1998 sebesar Rp 20,5 triliun dan tahun 1999 sebesar Rp 24,9 triliun. Seperti tampak pada grafik 5.2 dimana sejak 1997-1998 total investasi DPPK selalu lebih besar dari DPLK.



Hal diatas terjadi karena DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP sedang DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP.

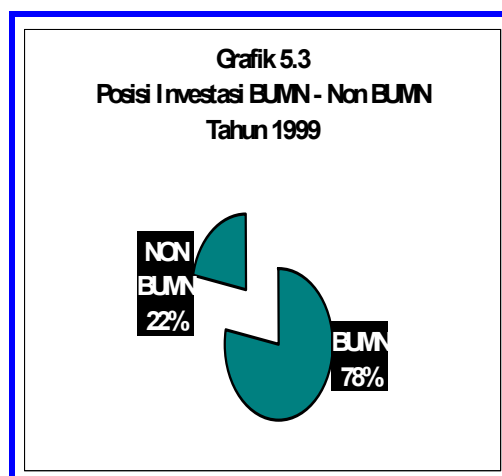
Jika dipandang dari statusnya, investasi Dana Pensiun dikelompokkan menjadi Dana Pensiun yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Non BUMN. Jumlah Investasi Dana Pensiun BUMN lebih besar daripada Dana Pensiun Non BUMN, seperti tampak pada Tabel 5.2 dibawah ini

Tabel 5.2

Perkembangan posisi Investasi Dana Pensiun BUMN dan NON BUMN Tahun 1997-1999

	(dalam jutaan rupiah)					
	1997	%	1998	%	1999	%
BUMN	12.592.806	82%	16.441.060	78%	20.227.220	78%
NON BUMN	2.849.796	18%	4.634.690	22%	5.704.959	22%
Total	15.442.602	100%	21.075.750	100%	25.932.179	100%

Berdasar prosentase, posisi investasi Dana Pensiun BUMN sebesar 82% pada tahun 1997 dan pada tahun 1998 menurun menjadi 78%. Walaupun jumlah BUMN hanya sekitar 20% dari seluruh Dana Pensiun, akan tetapi jumlah investasinya lebih besar dibandingkan Dana Pensiun Non BUMN. Dan di tahun 1999 investasi BUMN tetap lebih besar, meskipun prosentasenya sama dengan tahun 1998. Dari grafik 5.3 terlihat jelas bahwa investasi BUMN sebesar 78%, investasi Non BUMN sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan milik negara memiliki komitmen yang jelas untuk menyejahterakan karyawannya.



Pendapatan, beban, dan hasil bersih investasi ditunjukkan pada Tabel 5.3. Selama tahun 1999 Hasil bersih seluruh Dana Pensiun adalah Rp 5,2 triliun. Bila hasil bersih tersebut dibandingkan dengan posisi investasi Dana Pensiun per 31 Desember 1999 yang sebesar Rp 25,9 triliun, secara tidak langsung dapat diketahui hasil investasi Dana Pensiun selama tahun 1999 kurang lebih 20%. Hasil ini kurang lebih sama dengan tingkat bunga rata-rata Deposito Berjangka selama tahun 1999 dimana Deposito Berjangka merupakan jenis investasi yang terbesar dari total portofolio investasi Dana Pensiun.

Tabel 5.3

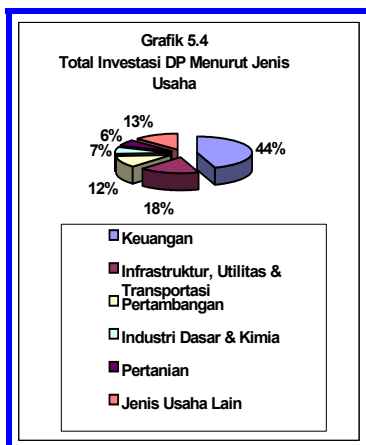
**Investasi Dana Pensiun
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 1999**

	(dalam jutaan rupiah)
Perkiraan	Total
Pendapatan Investasi	5.224.243
Beban Investasi	105.623
Hasil Bersih Investasi	5.118.210

Tabel 5.4

**Total Investasi Dana Pensiun Menurut Jenis Usaha Pendiri
Per 31 Desember 1999**

No	JENIS USAHA PENDIRI	TOTAL INVESTASI	%
1	Pertanian	1.574.925	6,1%
2	Pertambangan	3.039.408	11,7%
3	Industri Dasar & Kimia	1.810.819	6,9%
4	Aneka Industri	1.425.248	5,5%
5	Industri Barang Konsumsi	268.872	1,0%
6	Property & Real Estate	137.624	0,5%
7	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	4.567.202	17,6%
8	Keuangan	11.587.023	44,7%
9	Perdagangan	1.015.313	3,9%
10	Sosial	505.739	2,0%
	TOTAL INVESTASI	25.932.179	100%



Pada Tabel diatas dapat kita lihat bahwa sektor keuangan merupakan jumlah terbesar dari keseluruhan investasi yaitu sebesar 44,7%. Sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari bank-bank milik

pemerintah. Selanjutnya badan usaha yang bergerak di bidang Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi menempati posisi ke-2 dalam investasi yaitu sebesar 17,6% dari total investasi, badan usaha yang bergerak pada bidang pertambangan ada di posisi ke-3 yaitu sebesar 11,7%. Sektor pertanian dan industri dasar dan kimia memiliki prosentase yang hampir sama yaitu 6,1% dan 6,9% ,sedang sisanya sebesar 13% bergerak pada bidang aneka industri, industri barang konsumsi, property dan real estate, perdagangan dan sosial.

